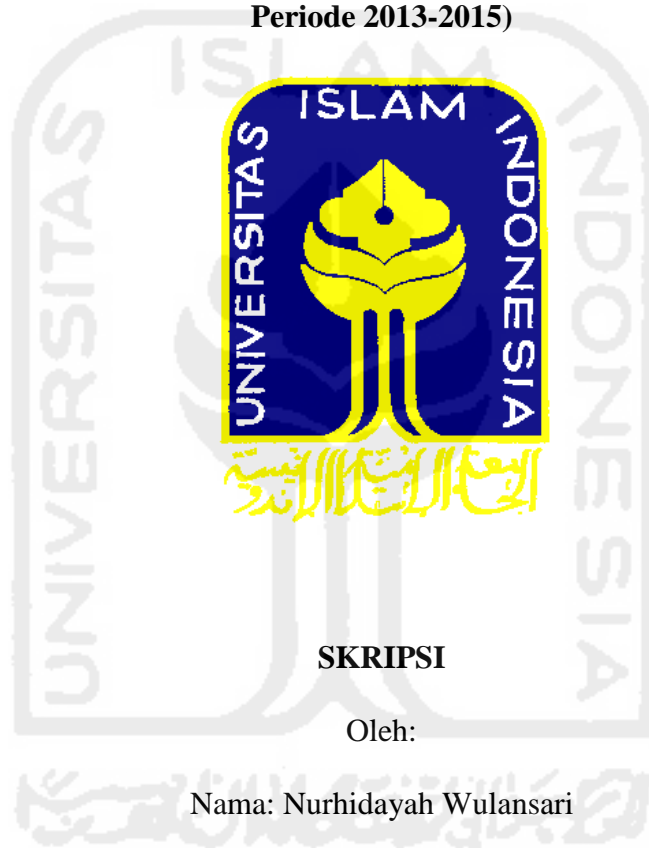


**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN  
KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KONSERVATISME  
AKUNTANSI, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN *LEVERAGE*  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI**

**Periode 2013-2015)**



**SKRIPSI**

Oleh:

Nama: Nurhidayah Wulansari

No. Mahasiswa: 14312611

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN  
KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KONSERVATISME  
AKUNTANSI, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN *LEVERAGE*  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar Di BEI  
Periode 2013-2015)**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata – 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Nurhidayah Wulansari

Nomor Mahasiswa: 14312611

Jurusan: Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, Februari 2017

Penulis,



Nurhidayah Wulansari

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN**  
**KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KONSERVATISME**  
**AKUNTANSI, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN *LEVERAGE***  
**TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**  
**(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI**  
**Periode 2013-2015)**

Nama: Nurhidayah Wulansari

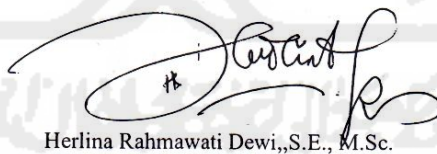
Nomor Mahasiswa: 14312611

Jurusan: Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, Februari 2017

Dosen Pembimbing



Herlina Rahmawati Dewi, S.E., M.Sc.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN KOMISARIS  
INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KONSERVATISME AKUNTANSI, PERTUMBUHAN  
PENJUALAN DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK ( STUDI  
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI  
PERIODE**

Disusun Oleh : **NURHIDAYAH WULANSARI**

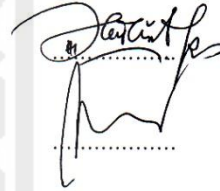
Nomor Mahasiswa : **14312611**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 21 Maret 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Herlina Rahmawati Dewi, SE.,M.Sc.

Penguji : Abriyani Puspaningsih, Dra., Ak., M.Si



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Ayah dan Ibu saya tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan setiap langkah saya
- Adik saya yang selalu memberi semangat
- Teman-teman dan sahabat yang selalu mendukung saya



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi. Penulis diperkenankan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak”. Adapun maksud dari penyusunan skripsi adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- 1 Allah SWT yang selalu memberikan berkah dan nikmatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- 2 Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, kehangatan dan kasih sayang serta perhatian yang luar biasa, saya ucapkan banyak terima kasih.
- 3 Bapak Dr. D. Agus Hardjito, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

- 4 Ibu Herlina Rahmawati Dewi, SE., M.Sc selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
- 5 Seluruh Dosen dan staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmunya.
- 6 Sahabat dan teman – teman beserta semua pihak yang telah membantu dan mendukung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca., yang pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Yogyakarta, Maret 2017

Penulis



(Nurhidayah Wulansari)



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iv
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi.....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran .....	xv
Abstrak .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	6
1.4 MANFAAT PENELITIAN .....	7
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 LANDASAN TEORI.....	10
2.1.1 Teori Keagenan .....	10
2.1.2 Penghindaran Pajak .....	12

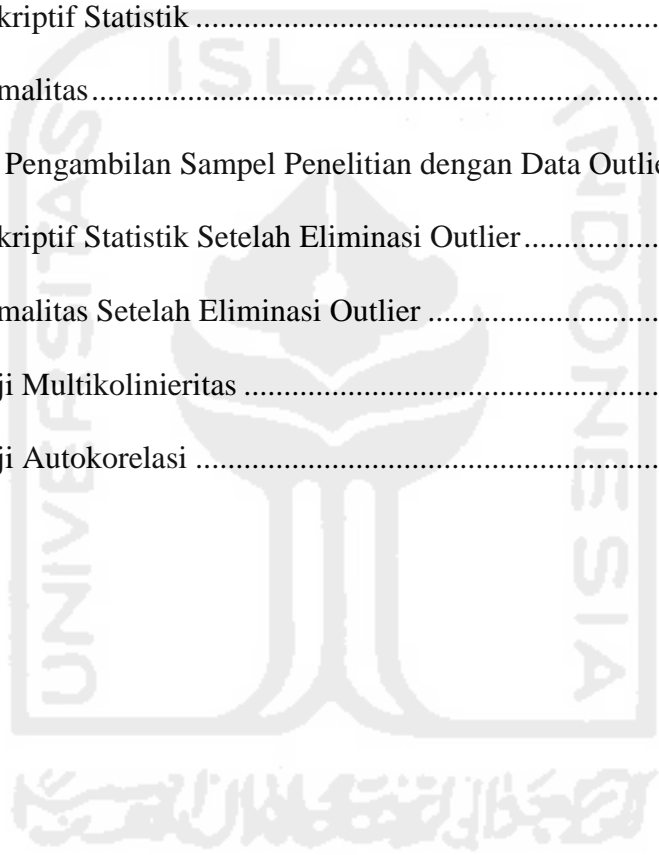
2.1.3. Kepemilikan Institusional .....	16
2.1.4 Proporsi Dewan Komisaris .....	18
2.1.5 Komite Audit.....	20
2.1.6 Konservatisme Akuntansi .....	21
2.1.7 Pertumbuhan Penjualan.....	24
2.1.8 <i>Leverage</i> .....	26
2.2 PENELITIAN TERDAHULU .....	27
2.3 KERANGKA PEMIKIRAN.....	41
2.4 HIPOTESIS PENELITIAN .....	41
2.4.1 Kepemilikan Institusioanal terhadap Penghindaran Pajak .....	41
2.4.2 Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak ..	43
2.4.3 Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak .....	44
2.4.4 Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak.....	45
2.4.5 Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak .....	47
2.4.6 <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak .....	48
BAB III: METODE PENELITIAN .....	50
3.1 POPULASI DAN SAMPEL.....	50
3.2 JENIS DAN SUMBER DATA.....	51
3.3 METODE PENGUMPULAN DATA .....	51
3.4 VARIABEL PENELITIAN.....	51
3.4.1 Variabel Dependen.....	51
3.4.1.1 Penghindaran Pajak .....	51
3.4.2 Variabel Independen .....	53

3.4.2.1	Kepemilikan Institusional.....	53
3.4.2.2	Proporsi Dewan Komisaris.....	53
3.4.2.3	Komite Audit.....	53
3.4.2.4	Konservatisme Akuntansi.....	54
3.4.2.5	Pertumbuhan Penjualan.....	55
3.4.2.6	<i>Leverage</i> .....	55
3.5	TEKNIK ANALISIS DATA.....	57
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	57
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	58
3.5.3	Pengujian Hipotesis.....	60
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	63
4.1	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	63
4.2	ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF.....	64
4.3	HASIL UJI ASUMSI KLASIK.....	64
4.3.1	Hasil Uji Normalitas.....	64
4.4	ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF SETELAH ELIMINASI OUTLIER.....	67
4.5	HASIL UJI ASUMSI KLASIK SETELAH ELIMINASI OUTLIER.....	71
4.5.1	Hasil Uji Normalitas Setelah Eliminasi Outlier.....	71
4.5.2	Hasil Uji Multikolinieritas.....	72
4.5.3	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	73
4.5.4	Hasil Uji Autokorelasi.....	75
4.6	ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA.....	75
4.6.1	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	77

4.6.2 Hasil Uji Statistik T.....	77
4.7 PEMBAHASAN.....	80
4.7.1 Kepemilikan Institusioanal terhadap Penghindaran Pajak .....	80
4.7.2 Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak ..	82
4.7.3 Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak .....	83
4.7.4 Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak.....	84
4.7.5 Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak .....	85
4.5.1 <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak .....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
5.1 KESIMPULAN .....	88
5.2 KETERBATASAN PENELITIAN .....	89
5.3 SARAN.....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	90
LAMPIRAN.....	95

## DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian di Luar Negeri .....	31
2.2 Penelitian di Indonesia .....	37
3.1 Variabel Penelitian .....	56
4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian .....	63
4.2 Uji Deskriptif Statistik .....	64
4.3 Uji Normalitas .....	65
4.4 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian dengan Data Outlier .....	66
4.5 Uji Deskriptif Statistik Setelah Eliminasi Outlier .....	67
4.6 Uji Normalitas Setelah Eliminasi Outlier .....	72
4.7 Hasil Uji Multikolinieritas .....	73
4.8 Hasil Uji Autokorelasi .....	75



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	41
4.1 Grafik Scatterplot.....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sampel Perusahaan sebelum Eliminasi Outlier.....	95
Lampiran 2: Sampel Perusahaan setelah Eliminasi Outlier .....	97
Lampiran 3: Data Penelitian .....	98
Lampiran 4: Data Outlier .....	101



## **ABSTRACT**

*Tax is the one source of revenue to the state contribution system shall be derived from the subject and addressed to the state tax. Company as a tax subject who gives the largest contribution in state tax revenue. Taxes for companies is a burden that can reduce corporate profits, and the tax for the state is the income that will be used to fund governance. The difference is what causes the interests of the company to manage the tax burden, either legally or illegally. Tax avoidance is one way for companies to manage their tax burden legally. Factors that may indicate the activity of the corporate tax avoidance must be observed both by investors and regulators in order to become more optimal state revenues. To determine the effect of institutional ownership, the proportion of independent board, audit committee, conservatism accounting, sales growth and leverage against tax avoidance is purpose of this study.*

*The population in this research is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 2013 - 2015. The sampling technique is done by using purposive sampling method. The number of manufacturing companies into a sample of 36 companies by eliminating the 3 samples because there are outliers. Outliers should be eliminated from the study sample in order to obtain normality. The study sample as many as 33 companies. where there are 99 annual report. The analytical method used is multiple regression analysis. Tax avoidance in this study was measured using CETR. The results of this study lead to the conclusion that the negative effect on the audit committee of tax avoidance, the proportion of independent board and leverage positive effect on tax avoidance, as well as institutional ownership, accounting conservatism and sales growth has no effect on tax avoidance.*

*Keywords: institutional ownership, Proportion of Independent Commissioner Board, the Audit Committee, the Accounting Conservatism, Sales Growth, Leverage, Tax Avoidance*



## ABSTRAK

Pajak adalah satu salah satu sumber penerimaan negara dengan sistem iuran wajib yang berasal dari subjek pajak dan ditujukan untuk negara. Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sedangkan pajak bagi negara merupakan pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan perusahaan melakukan pengelolaan beban pajak, baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengelola beban pajaknya secara legal. Faktor – Faktor yang dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak perusahaan harus dicermati baik oleh investor maupun regulator agar penerimaan negara menjadi lebih optimal. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak merupakan tujuan dari penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 – 2015. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah perusahaan manufaktur yang menjadi sampel sebanyak 36 perusahaan dengan mengeliminasi 3 sampel dikarenakan terdapat outlier. Outlier harus dieliminasi dari sampel penelitian agar menghasilkan normalitas yang baik. sehingga sampel penelitian ini sebanyak 33 perusahaan. yang dimana terdapat 99 laporan tahunan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Penghindaran pajak pada penelitian ini diukur menggunakan CETR. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, proporsi dewan komisaris independen dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, serta kepemilikan institusional, konservatisme akuntansi dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan, *Leverage*, Penghindaran Pajak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak adalah iuran dari rakyat baik wajib pajak pribadi maupun badan yang digunakan untuk kemakmuran rakyat yang bersifat memaksa. Peranan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan pada tahun 2013, porsi penerimaan pajak adalah sebesar 1.077.307 Miliar, untuk tahun 2014 meningkat menjadi 1.146.866 Miliar, dan untuk tahun 2015 juga meningkat menjadi 1.489.256 Miliar (sumber: BPS diakses tanggal 15 Mei 2016).

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan untuk Negara, tetapi menjadi beban bagi suatu badan atau perusahaan. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar hukum.

Fakta membuktikan Global Financial Integrity mencatat aliran dana haram atau *illicit* yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia dan dikirim ke luar negeri mencapai US\$6,6 triliun. Dalam kurun waktu 2003 sampai 2012, aliran dana *illicit* dari Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat dari US\$297,41 miliar menjadi US\$991,3 miliar, atau secara rata-rata meningkat 9,4% per tahun . Jika diestimasikan Indonesia kehilangan uang hingga Rp240 triliun setara kurang lebih 4% produk domestik bruto setiap tahunnya. Praktik yang lazim digunakan untuk melakukan penghindaran pajak adalah

*transfer pricing* (Aditya, 2016). Dengan adanya praktik penghindaran pajak tersebut tarif pajak yang dibayarkan oleh badan usaha bisa turun drastis.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menurut Santoso dan Muid (2014) adalah perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Salah satu cara untuk mengukur penghindaran pajak yaitu melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR merupakan efektivitas pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam arus kas (Suyanto dan Supramono, 2012). Menurut Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010) pengukuran penghindaran pajak dengan menggunakan CETR baik digunakan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak.

Partner *Tax Compliance and Litigation Services*, David Hamzah Danian pada majalah *InsideTax* (Mei-Juni 2013) mengatakan saat ini telah banyak negara yang membuat ketentuan anti penghindaran pajak. Ketentuan penghindaran pajak dibagi menjadi dua kelompok yaitu: *Specific Anti Avoidance* (SAAR) dan *General Anti Avoidance Rules* (GAAR). SAAR yaitu ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat spesifik, untuk mencegah suatu skema penghindaran pajak tertentu. Sedangkan GAAR adalah ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum, untuk mencegah transaksi yang semata-mata bertujuan untuk menghindari pajak dan tidak mempunyai motif bisnis. Di Indonesia sendiri saat ini hanya mengatur anti penghindaran pajak yang bersifat spesifik dan belum mempunyai ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum. Ketentuan penghindaran pajak yang bersifat spesifik di Indonesia, seperti: *transfer pricing*,

penjualan saham melalui *conduit company*, penjualan atau pengalihan saham perusahaan *conduit company*, *limitation on benefits*, dan *business purposes test* terkait dengan pengambilalihan kompensasi kerugian atas transaksi penggabungan usaha.

Masalah mengenai pajak telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti baik di luar negeri maupun di Indonesia. Penelitian di luar negeri yaitu Paulo dan Gomes (2016), Khaoula (2013), Zemzem dan Ftouhi (2013), Khaoula dan Ali (2012), serta Richardson dan Lanis (2007). Sedangkan penelitian yang dilakukan di Indonesia yaitu Sandy dan Lukviarman (2015), Swingly dan Sukartha (2015), Pramudito dan Sari (2015), Ngadiman dan Puspitasari (2014) serta Kurniasih dan Sari (2013). Dari beberapa penelitian tersebut masih memberikan hasil yang belum konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya persentase saham yang dimiliki oleh institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak. Sementara hasil penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014), faktor kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional yang dimiliki oleh pihak eksternal maka semakin kuat dalam mengendalikan perusahaan. Pihak eksternal dapat memengaruhi pihak manajemen dalam kegiatannya untuk dapat mengendalikan perusahaan termasuk juga tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian Sandy dan Lukviarman (2015), Khaoula (2013), serta Richardson dan Lanis (2007) menunjukkan bahwa faktor proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini berarti komisaris independen melakukan pengawasan yang baik terhadap manajemen dalam mencegah terjadinya penghindaran pajak. Sementara hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), Zemzem dan Ftouhi (2013), serta Khaoula dan Ali (2012) menunjukkan bahwa faktor proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan dan negatif. Hal ini berarti adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen tidak dapat dikendalikan oleh komisaris independen.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) menunjukkan bahwa faktor komite audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak. Jika jumlah komite audit sesuai dengan yang di syaratkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu minimal 3 dalam suatu perusahaan, maka kecenderungan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak semakin minim. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa faktor komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti jika jumlah komite audit tidak sesuai dengan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan minimal tiga orang, tidak memberikan pengaruh pada manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil dari penelitian sebelumnya Pramudito dan Sari (2015), serta Jaya, Arafat, dan Kartika (2014) menunjukkan faktor konservatisme akuntansi tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini belum dapat membuktikan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat konservatisme akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam pelaporan keuangan dengan mengecilkan laba perusahaan maka pajak yang akan dikenakan juga akan kecil.

Hasil dari penelitian Singly dan Sukartha (2015) juga belum dapat membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin meningkat pertumbuhan penjualan, tentunya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan semakin rendah.

Hasil dari penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014), Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan bahwa faktor *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara hasil penelitian Singly dan Sukartha (2015), Richardson dan Lanis (2007) telah membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan dengan hutang perusahaan yang tinggi maka juga akan memberikan beban bunga yang tinggi, beban bunga ini lah nantinya akan mengurangi pajak yang akan dibebankan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat variabel yang belum memberikan hasil yang konsisten dan variabel baru. Variabel yang belum memberikan hasil yang konsisten yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan *leverage*. Sedangkan variabel baru yaitu konservatisme akuntansi dan pertumbuhan penjualan dimana pada penelitian sebelumnya belum dapat membuktikan bahwa terdapat pengaruh terhadap

penghindaran pajak. Oleh sebab itu penelitian ini akan meneliti kembali tentang **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak”**.

### **1.2. Rumusan masalah**

Mengacu pada deskripsi di atas, penulis tertarik untuk mengamati dan mengembangkan lebih lanjut mengenai variabel yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun hal-hal yang ingin dianalisis adalah:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak?
5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak?
6. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis faktor kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis faktor proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk menganalisis faktor komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis faktor konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menganalisis faktor pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menganalisis faktor *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **1.4. Manfaat penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti selanjutnya dan meningkatkan perkembangan terhadap teori-teori mengenai penghindaran pajak.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana evaluasi oleh Direktorat Jendral Pajak akan adanya penghindaran pajak. Sehingga Direktorat Jendral Pajak meninjau kembali peraturan dalam perpajakan sehingga dapat memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.
3. Bagi perusahaan agar lebih berhati – hati dalam membuat keputusan maupun kebijakan agar terhindar dari status penghindaran pajak yang melanggar hukum.



## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II: Kajian Pustaka**

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori dan pengertian variabel atas penelitian, telaah penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Dalam bab ini menguraikan metode penelitian yang berhubungan dengan data dan analisis yang akan digunakan tentang penelitian pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.

### **Bab IV: Analisis data dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data maupun hasil pengujian hipotesis yang akan dilakukan. Penjelasan hasil penelitian ini dimulai dari deskripsi objek penelitian, analisis data, pemaparan hasil analisis, selanjutnya berisi tentang pembahasan hasil penelitian dari data yang diperoleh.

## **Bab V: Kesimpulan dan Saran**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil analisis data serta saran yang dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) dipilih sebagai dasar pengembangan konsep dalam penelitian ini. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam konsep teori keagenan, menyatakan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen. Prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham, sedangkan manajemen sebagai agen. Jika kedua belah pihak (agen dan prinsipal) adalah orang – orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Prinsipal dapat membatasinya dengan menetapkan insentif yang tepat bagi agen dan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi agen yang menyimpang. Hal ini lah yang akan menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya keagenan adalah jumlah dari biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Namun, umumnya tidak mungkin bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan prinsipal karena adanya perbedaan kepentingan yang

besar diantara mereka. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan menjadi tiga, yaitu:

1. *The monitoring expenditures by the principle*

Adalah biaya yang timbul dan ditanggung prinsipal untuk memonitor perilaku agen.

2. *The bonding expenditures by the agent*

Adalah biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal.

3. *The residual loss*

Adalah nilai kerugian yang dialami prinsipal akibat keputusan yang diambil oleh agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh prinsipal.

Hubungan teori keagenan dengan penelitian pajak ini adalah adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, prinsipal akan melakukan monitoring atau pengawasan dengan mengeluarkan biaya terhadap agen agar tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan agar perusahaan terhindar dari konsekuensi jangka panjang atas perbuatan penghindaran pajak tersebut.

Hubungan lain teori keagenan dengan penghindaran pajak ini adalah adanya konflik yang terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak agen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang

cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah (Prakosa, 2014). Hal ini dapat disebabkan oleh pihak prinsipal yang memberi mandat pada agen untuk meminimalkan pajak perusahaan, sehingga perusahaan membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya. Apabila agen tidak mematuhi atas kepentingan prinsipal maka agen akan menanggung biaya.

### **2.1.2 Penghindaran Pajak**

Upaya dalam meminimalisasikan beban pajak dapat dilakukan dalam berbagai cara, mulai dari memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada maupun melanggar peraturan pajak. Beberapa istilah dalam penyebutan penghindaran pajak yang sering digunakan bergantian, seperti manajemen pajak (*Tax Management*), perencanaan pajak (*Tax Planning*), dan agresivitas pajak (*Tax Aggressiveness*).

Manajemen pajak (*Tax Management*), perencanaan pajak (*Tax Planning*), dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), merupakan cara legal untuk mengurangi beban pajak, ketika wajib pajak mengidentifikasi peluang dalam undang-undang untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi), dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal – hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan (Pohan, 2011:8). Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib

pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2011:9). Sedangkan agressivitas pajak menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009) adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal atau ilegal (*Tax Evasion*). *Tax evasion* merupakan upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun tidak aman bagi wajib pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang – Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri (Pohan, 2011:14).

Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak (Brotodihardjo, 1986:14). Penghindaran pajak menurut Pohan (2011:14) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang – Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) penghindaran pajak merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya

ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan. Halim, Bawono, dan Dara (2016:8) mendefinisikan penghindaran pajak adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2008) penghindaran pajak adalah segala sesuatu yang dilakukan perusahaan yang berakibat pada pengurangan terhadap pajak perusahaan. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan hukum pajak yang terkesan tidak melanggar hukum perpajakan. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan. Tindakan penghindaran pajak ini bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang pajak.

Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan penghindaran pajak adalah suatu usaha yang dilakukan dengan mengurangi ataupun mengecilkan biaya pajak yang terutang yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan Undang – Undang dan Peraturan Perpajakan. Penyebab dari penghindaran pajak meliputi tarif pajak yang terlalu tinggi, undang – undang yang tidak tepat, hukuman yang tidak memberikan efek jera, dan ketidakadilan

yang nyata. Ketika situasi ini terjadi, penghindaran pajak akan cenderung meningkat (Halim et al., 2016:8).

Di banyak negara, penghindaran pajak dibedakan atas penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Menurut buku yang berjudul “Manajemen Perpajakan” yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2015:81) suatu transaksi akan disebut sebagai penghindaran pajak yang tidak diperkenankan apabila memiliki ciri-ciri: tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak, tidak sesuai dengan maksud pembuat Undang – Undang (*spirit & intension of parliament*), adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian. Begitu juga sebaliknya dengan transaksi digolongkan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan jika memenuhi karakteristik: memiliki tujuan usaha yang baik, bukan semata-mata untuk menghindari pajak, sesuai dengan maksud pembuat Undang – Undang (*spirit & intension of parliament*) dan tidak melakukan transaksi yang direkayasa. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara yaitu:

1. Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, seperti tidak merokok agar tidak terhindar dari cukai tembakau.
2. Pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi dengan tarif pajak yang tinggi ke lokasi tarif pajak yang rendah, sebagai contoh adalah diberikannya keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modal di wilayah Indonesia Timur.
3. Penghindaran pajak secara yuridis.



### **2.1.3 Kepemilikan Institusional**

H. T. Pohan (2009) menyatakan bahwa struktur kepemilikan saham pada perusahaan publik dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu pemegang saham perorangan, pemegang saham institusi, dan kepemilikan saham manajerial. Pemegang saham yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan yang handal adalah pemegang saham mayoritas (terkonsentrasi), institusional atau terkonsentrasi pada pemilik institusional (Tarjo, 2008).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Sandy dan Lukviarman (2015) mendefinisikan kepemilikan saham institusional adalah prosentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan individu atau atas nama perorangan di atas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain baik dalam negeri ataupun asing dengan kepemilikan di atas lima persen (5%).

Menurut Sandy dan Lukviarman (2015) terdapat beberapa kelebihan kepemilikan institusional antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional yang berperan sebagai pemegang saham mayoritas memiliki kelebihan dari sisi pendanaan dan dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya dirinya sendiri. Kepemilikan institusional dapat menempatkan orangnya kedalam jajaran manajemen perusahaan agar tujuan mereka dapat tercapai. kepemilikan institusional menyerahkan pengelolaan investasinya pada divisi khusus dengan menunjuk profesional yang memiliki keahlian dibidang analisis dan keuangan, sehingga pemilik institusional dapat memantau perkembangan investasinya dengan baik (Tarjo, 2008). Sehingga peran kepemilikan institusional memiliki insentif dalam melakukan pengawasan secara efektif terhadap manajemen serta memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengubah keputusan manajemen. Hal ini juga dapat mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Namun pemilik institusional sebagai pemegang saham mayoritas tidak akan meminta orang-orangnya yang ditempatkan pada manajemen untuk meminimalkan nilai pajak, karena jika pemilik institusional meminimalkan pajak yang menguntungkan dirinya, maka pemegang saham minoritas dan pasar saham akan mendiskon harga saham perusahaan yang justru akan merugikan pemilik institusional atau pemegang saham mayoritas itu sendiri (Tarjo, 2008).

Khurana dan Moser (2009) menyatakan bahwa bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi umumnya akan lebih mengurangi tingkat kewajiban pajak. Kepemilikan institusional dengan kepemilikan saham jangka pendek yang semakin tinggi, maka semakin akan meningkatkan dalam mengurangi tingkat kewajiban pajak yang terutang.

Sebaliknya, jika kepemilikan institusional dengan kepemilikan saham jangka panjang meningkat, maka perusahaan akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak.

#### **2.1.4 Proporsi Komisaris Independen**

Dewan komisaris merupakan bagian dari perusahaan yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam melakukan pengambilan keputusan operasional. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Terafiliasi yaitu pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (Binhadi et al., 2006). Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi dan pemegang saham pengendali (Samsul, 2015:119).

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen adalah perbandingan antara jumlah komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan jumlah komisaris keseluruhan pada suatu perusahaan baik komisaris yang mempunyai hubungan afiliasi maupun yang tidak mempunyai hubungan afiliasi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No.33/POJK.04/2014 dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. 1 (satu) di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan komisaris independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nasional dan Remunerasi. Komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi dan keuangan. Pembentukan dewan komisaris adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor manajer (Arifin, 2005:61). Namun yang sering terjadi pengawasan yang dilakukan dean komisaris terhadap manajemen tidak efektif. Hal ini terjadi karena proses pemilihan dewan komisaris sering tidak demokratis dimana kandidat dewan komisaris sering dipilih oleh manajemen sehingga setelah terpilih tidak berani memberikan kritik terhadap manajemen. Namun jika dewan didominasi oleh anggota dari luar (*independent board of director*) maka monitoring dewan komisaris terhadap manajer menjadi efektif (Arifin, 2005:61).

Menurut Effendi (2009:19) dalam praktik yang terjadi di Indonesia terdapat kecenderungan bahwa komisaris independen sering kali melakukan intervensi terhadap direksi dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, direksi biasanya sangat kuat bahkan ada direksi yang enggan membagi wewenang serta

tidak memberikan informasi yang memadai kepada komisaris. Selain itu hambatan yang lain adalah masih lemahnya kompetensi dan integritas mereka dikarenakan pengangkatan hanya berdasarkan penghargaan, hubungan keluarga, nepotisme. Maka dari itu dalam melakukan perekrutan komisaris independen, independensi dan kapabilitas merupakan prioritas utama.

#### **2.1.5 Komite Audit**

Zarkasyi (2008) menyatakan komite audit adalah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal – hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2009:25).

Keanggotaan komite audit sekurang – kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota (Samsul, 2015:120). Sedangkan menurut Binhadi et al (2006) bahwa jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta

perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 menjelaskan bahwa peranan dan tanggung jawab komite audit adalah:

1. Melakukan penelaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
2. Melakukan penelaah atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
3. Melakukan penelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
5. Melakukan penelaah dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik,
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

#### **2.1.6 Konservatisme Akuntansi**

Konservatisme merupakan alasan yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun manajer yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui rugi (*bad news in earnings*) (Basu, 1997). Menurut Dwimulyani (2010) konservatisme

akuntansi adalah prinsip kehati-hatian yang tidak mengakui keuntungan sampai dengan diperoleh bukti yang kredibel, sedangkan kerugian harus segera diakui pada saat terdapat kemungkinan akan terjadi, tidak perlu menunggu sampai terdapat bukti riil. Konservatisme akuntansi menyebabkan angka-angka yang tersaji dalam neraca dan laporan laba rugi adalah ditetapkan lebih rendah.

Aktiva bersih perusahaan dan laba yang rendah serta utang dan biaya ditetapkan pada nilai yang tertinggi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang menggunakan prinsip konservatisme dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan (Raharja dan Sandra, 2014). Jika pemakai laporan keuangan ingin membandingkan dua laporan keuangan dari dua perusahaan yang berbeda dimana perusahaan yang satu menggunakan akuntansi konservatif dalam penyusunan laporan keuangannya dan perusahaan lainnya menggunakan akuntansi agresif dalam penyusunan laporan keuangannya maka pemakai tersebut tidak dapat mengambil keputusan dengan tepat jika hanya mengandalkan data dari laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa konservatisme membuat laporan keuangan menjadi tidak *reliable* dan tidak relevan bagi penggunaannya (Raharja dan Sandra, 2014). Dari definisi sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa konservatisme akuntansi adalah sikap waspada dalam mengakui aktiva dan laba dibanding dengan mengakui rugi ataupun hutang dalam pelaporan keuangan.

Contoh konservatisme akuntansi adalah memilih antara kos atau harga pasar yang lebih rendah untuk akuntansi sediaan, atau segera mengakui perubahan dalam estimasi kos jika diperkirakan menghasilkan kerugian di masa yang akan datang pada kontrak jangka panjang, tetapi tidak melakukan revisi jika

menghasilkan peningkatan laba di masa yang akan datang, atau penurunan nilai fisik aset karena keusangan (*impairments*), tetapi tidak menaikkan untuk nilai aset lebih tinggi (Dwimulyani, 2010). Jadi, konservatisme menghasilkan probabilitas lebih besar dari pengakuan akuntansi tepat waktu untuk kabar buruk dari pada kabar baik.

Menurut Watts (2003) bahwa ada empat masalah yang mendorong penggunaan konservatisme :

1. Kontrak

Di dalam perjanjian kontrak manajer berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang berkepentingan dalam perusahaan seperti pemegang saham, kreditor, dan dewan komisaris. Pada saat penyajian laporan keuangan biasanya *moral hazard* (moral dalam penyampaian) akan timbul selama laporan tersebut berfungsi untuk memberi informasi kepada investor tentang kinerja manajer karena informasi tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dalam investasi dan kesejahteraan manajer. Kesejahteraan manajer ini juga akan mempengaruhi motivasi manajer untuk memasukan *bias and noise* (kesalahan).

2. Tuntutan Hukum

Tuntutan hukum mendorong perkembangan konservatisme karena tuntutan hukum selalu terjadi saat laba dan aktiva di catat terlalu tinggi, selain itu juga adanya potensi tuntutan hukum disebabkan pencatatan yang



*overstatement*. Sehingga manajer dan auditor terdorong untuk melaporkan laba dan aktiva yang konservatif.

### 3. Perpajakan

Penundaan terhadap pembayaran pajak juga mendorong penggunaan konservatisme. Dengan konservatisme, perusahaan dapat mengurangi *present value* pajak dengan jalan menunda pengakuan pendapatan.

### 4. Peraturan

Peraturan yang di keluarkan oleh standar akuntansi memberikan insentif kepada perusahaan untuk menerapkan akuntansi yang konservatif. Bagi penyusun standar akuntansi, konservatisme akan menghindarkan mereka dari kritik akibat penyajian laporan keuangan yang *overstate*.

#### **2.1.7 Pertumbuhan Penjualan**

Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin yang menduduki posisi teratas yaitu top eksekutif dengan top manajer dimana mempunyai tujuan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Menurut Low (2006) ada dua karakter eksekutif yaitu, *risk taker* dan *risk averse*. *Risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis (Budiman dan Setiyono, 2012).

Menurut Hartono (2014) risiko ada kaitanya dengan *return* yang diperoleh perusahaan, bahwa risiko merupakan penyimpangan atau deviasi dari *outcome* yang diterima dengan yang diekspektasi. Dengan demikian dapat diartikan semakin besar deviasi antara *outcome* yang diterima dengan diekspektasikan mengindikasikan semakin besar pula risiko yang ada. Hal ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan juga akan meningkat apabila seorang eksekutif semakin bersifat *risk taker*.

Pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun, perkembangan tersebut bisa meningkat atau menurun (Budiman dan Setiyono, 2012). Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya.

Pertumbuhan penjualan mencerminkan tingkat produktivitas yang siap beroperasi serta mencerminkan kapasitas saat ini yang dapat diserap pasar dan mencerminkan daya saing perusahaan dalam pasar. Selain itu pertumbuhan penjualan juga mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Tingkat pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat dihitung dengan mengurangkan pertumbuhan penjualan pada tahun yang diteliti dengan

pertumbuhan penjualan tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan pertumbuhan penjualan pada tahun yang diteliti.

### **2.1.8 Leverage**

Menurut Tarjo (2008) *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Semakin besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan maka ketidakpastian untuk menghasilkan laba di masa depan juga akan makin meningkat. Raharjaputra (2009:200) mendefinisikan *leverage* yaitu sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri (*shareholder equity*) yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditur. Hal yang pertama adalah para kreditur melihat dan menganalisis beberapa jumlah dana sendiri yang telah disetor sebagai *margin of safety*. *Margin of safety* merupakan petunjuk jumlah maksimum penurunan angka volume penjualan yang direncanakan yang tidak mengakibatkan kerugian (Wahyuni, 2012). Apabila pemilik perusahaan hanya memiliki dana sendiri dengan porsi yang kecil dari jumlah dana yang dibutuhkan, maka kreditur memiliki beban atau risiko besar. Kedua, dengan dana pinjaman dari kreditur, pemilik berusaha memiliki keuntungan, yaitu masih memiliki hak mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi terbatas. Ketiga, jika perusahaan memiliki kelebihan atau keuntungan dari selisih keuntungan operasional dengan bunga atau biaya modal, maka pemilik perusahaan akan memperoleh keuntungan tersebut.

*Leverage* keuangan menurut Subramanyam dan Wild (2010:265) merupakan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. *Leverage* memperbesar

keberhasilan (laba) dan kegagalan (rugi) manajerial. Utang yang terlalu besar menghambat inisiatif dan fleksibilitas manajemen untuk mengejar kesempatan yang menguntungkan. Menurut Subramanyam dan Wild (2010:265) dari sudut pandang pemegang saham, utang adalah sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena dua alasan:

1. Bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih kecil daripada pengembalian atas aset operasi bersih, selisih pengembalian tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas.
2. Bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan deviden tidak.

Perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah, memiliki rasio yang kecil apabila kondisi perekonomian menurun, tetapi sebaliknya, apabila kondisi perekonomian sedang naik, perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar (Raharjaputra, 2009).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu baik di luar negeri maupun di Indonesia yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Paulo dan Gomes (2016) meneliti mengenai *Corporate Governance Characteristics as a Stimulus to Tax Management*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di tata kelola perusahaan tingkat tertentu, tata kelola perusahaan tertentu, jumlah dewan direksi independen, pemisahan antara ketua dan CEO, adopsi dewan eksekutif, manajemen pajak pada periode sebelumnya berpengaruh negatif

signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan jumlah anggota dewan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Zemzem dan Ftouhi (2013) meneliti mengenai *The Effects of Board of Directors' Characteristics on Tax Aggressiveness*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa persentase direktur independen dan dualitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Jumlah dewan berpengaruh negatif signifikan dan perbedaan dewan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Khaoula (2013) meneliti mengenai *Does Corporate Governance Affect Tax Planning? Evidence from American Companies*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak. Persentase saham yang diberikan kepada manajer dan persentase direksi luar yang membantu dewan berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan pajak, serta jumlah dewan berpengaruh tidak signifikan terhadap perencanaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Khaoula dan Ali (2012) meneliti mengenai pengaruh *The Board of Directors and The Corporate Tax Planning: Empirical Evidence from Tunisia*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jumlah dewan dan independensi direktur berpengaruh tidak signifikan terhadap perencanaan pajak. Dualitas berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan pajak, dan gender berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) meneliti mengenai *Determinants of The Variability In Corporate Effective Tax Rates and*

*Tax Reform: Evidence from Australia*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, intensitas penelitian dan pengembangan, *the ralph review tax reform*, *the ralph review tax reform* dan intensitas persediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif. Persediaan Intensitas intensitas persediaan, *the ralph review tax reform* dan *leverage*, *the ralph review tax reform* dan intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif, sedangkan *the ralph review tax reform* dan intensitas penelitian dan pengembangan berpengaruh tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) yang meneliti mengenai Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian ini menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan proporsi komisaris independen, kualitas audit, komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramudito dan Sari (2015) meneliti mengenai Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konservatisme akuntansi dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) meneliti mengenai Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan,

*Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif pada penghindaran pajak, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif dan komite audit tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) meneliti mengenai Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Intitusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) meneliti mengenai Pengaruh ROA, *Leverage*, Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ROA, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *leverage*, komposisi komisaris independen, keberadaan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berikut tabel penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1 Penelitian Di Luar Negeri**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	Paulo dan Gomes (2016)	<i>Corporate Governance Characteristics as a Stimulus to Tax Management</i>	Variabel dependen: Manajemen Pajak. Variabel independen: Perusahaan yang Terdaftar di Tata Kelola Perusahaan Tingkat Tertentu, Tata Kelola Perusahaan Tertentu, Jumlah Anggota Dewan Perusahaan, Jumlah Dewan Direksi Independen, Pemisahan Antara Ketua dan CEO, Adopsi Dewan Eksekutif,	Perusahaan yang terdaftar di tata kelola perusahaan tingkat tertentu, tata kelola perusahaan tertentu, jumlah dewan direksi independen, pemisahan antara ketua dan CEO, adopsi dewan eksekutif, manajemen pajak pada periode sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap



			Manajemen Pajak pada Periode Sebelumnya	manajemen pajak. Sedangkan jumlah anggota dewan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak
2	Zemzem dan Ftouhi (2013)	<i>The Effects of Board of Directors' Characteristics on Tax Aggressiveness</i>	Variabel dependen: Agresivitas Pajak. Variabel independen: Persentase Direktur Independen, Jumlah Dewan, Dualitas, Perbedaan Dewan.	Persentase direktur independen dan dualitas berpengaruh tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Jumlah dewan berpengaruh negatif signifikan dan perbedaan dewan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

3	Khaoula (2013)	<i>Does Corporate Governance Affect Tax Planning? Evidence from American Companies</i>	Variabel dependen: perencanaan pajak.  Variabel independen: CSR, Persentase Saham yang Diberikan Kepada Manajer dan Persentase Direksi Luar yang Membantu Dewan, dan Jumlah Dewan	CSR berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak. Persentase saham yang diberikan kepada manajer dan persentase direksi luar yang membantu dewan berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan pajak, serta jumlah dewan berpengaruh tidak signifikan terhadap perencanaan pajak.
---	-------------------	--	--	---

4	Khaoula dan Ali (2012)	<i>The Board of Directors and The Corporate Tax Planning: Empirical Evidence from Tunisia</i>	Variabel dependen: Perencanaan Pajak. Variabel independen: Jumlah Dewan, Independensi Direktur, Dualitas, Gender	Jumlah dewan dan independensi direktur berpengaruh tidak signifikan terhadap perencanaan pajak, dualitas berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan pajak, dan gender berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak.
---	------------------------	---	--	---



5	Richardson dan Lanis (2007)	<i>Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia</i>	Variabel dependen: Tarif Pajak Efektif. Variabel independen: Ukuran Perusahaan, Leverage, Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Intensitas Penelitian dan Pengembangan, The Ralph Review Tax Reform, The Ralph Review Tax Reform dan Leverage, The Ralph Review Tax Reform dan Intensitas Modal, The Ralph Review Tax Reform dan Intensitas Persediaan, The Ralph Review Tax	Ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, intensitas penelitian dan pengembangan, the ralph review tax reform, the ralph review tax reform dan intensitas persediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif. Persediaan Intensitas intensitas persediaan, the ralph review tax reform dan leverage, the ralph review tax reform dan intensitas modal berpengaruh
---	-----------------------------	---	---	--

			<p><i>Reform</i> dan Intensitas Penelitian dan Pengembangan,</p>	<p>positif signifikan terhadap tarif pajak efektif, sedangkan <i>the ralph review tax reform</i> dan intensitas penelitian dan pengembangan berpengaruh tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif.</p>
--	--	--	--	--



**Tabel 2.2 Penelitian Di Indonesia**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Sandy dan Lukviarmann (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur	Variabel dependen: Penghindaran pajak Variabel independen: Kepemilikan Institutional, Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, proporsi komisaris independen, kualitas audit, komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
2.	Pramudito dan Sari (2015)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel independen: Konservatisme	Konservatisme akuntansi dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif

		terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Akuntansi, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris	terhadap pertumbuhan penjualan,
3.	Swingly dan Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel independen: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan penjualan	Karakter eksekutif , ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif pada penghindaran pajak, komite audit tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

4.	Ngadiman dan Puspitasari (2014)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Intitusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel independen: <i>Leverage</i> , Kepemilikan Intitusional, dan Ukuran Perusahaan	<i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
----	---------------------------------	---	---	--

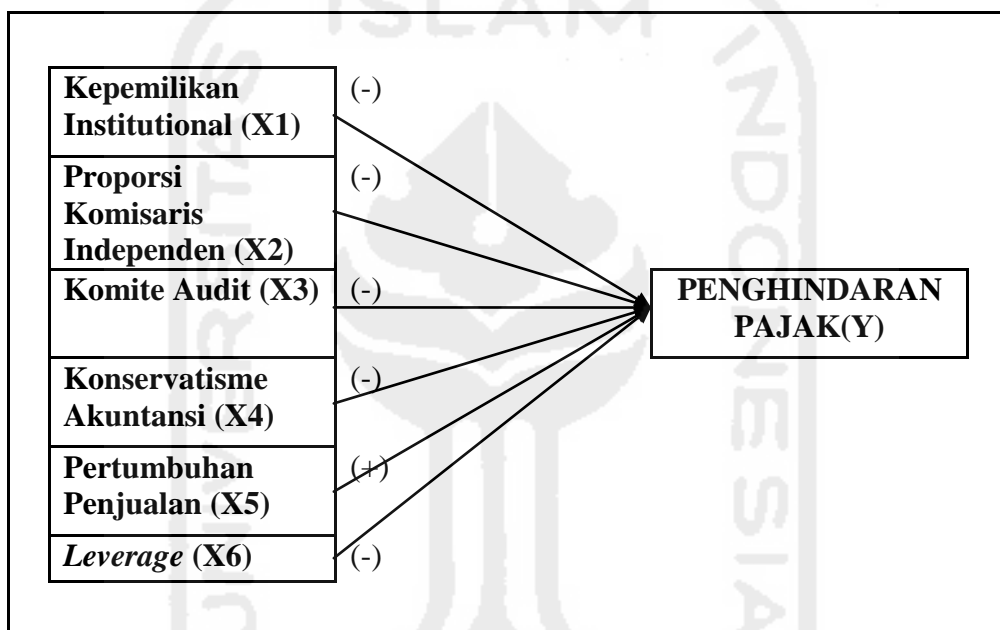


5.	Kurniasih dan Sari (2013)	Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance,</i> Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance.</i> Variabel independen: ROA, <i>Leverage,</i> Komposisi Komisaris Independen, Keberadaan Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal	ROA, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak., <i>leverage,</i> komposisi komisaris independen, keberadaan komite audit tidak berpengaruh signifikan penghindaran pajak.
----	---------------------------	--	--	--

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran permasalahan penelitian yang akan diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, komite audit, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan dan *leverage*.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



### 2.4 Hipotesis Penelitian

#### 2.4.1. Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap manajemen yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. Sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Semakin besar prosentase saham yang dimiliki oleh

institusional akan menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan institusional dianggap lebih profesional dalam mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena mereka memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan penghindaran pajak.

Menurut Khurana dan Moser (2009) bahwa kepemilikan institusional dengan kepemilikan saham jangka pendek yang semakin tinggi, akan meningkatkan dalam mengurangi tingkat kewajiban pajak yang terutang. Kepemilikan saham jangka pendek hanya berfokus pada profitabilitas jangka pendek semata dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang dan mengambil keuntungan dari kegiatan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika kepemilikan institusional dengan kepemilikan saham jangka panjang meningkat, maka perusahaan akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dengan saham jangka panjang akan berfokus pada nilai jangka panjang dan lebih peduli dengan konsekuensi jangka panjang dari aktivitas penghindaran pajak.

Penelitian tentang kepemilikan institusional yang telah diteliti oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) memberikan hasil yang berbeda bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak tidak ditentukan oleh variabel kepemilikan institusional. Dengan kata lain tinggi atau rendahnya persentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang belum memberikan hasil yang konsisten dengan teori, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.**

#### **2.4.2. Proporsi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Proporsi Komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu pemilihan dewan komisaris independen harus dari pihak luar bukan dari pihak yang terafiliasi dan dilakukan secara demokratis agar dapat melakukan pengawasan manajemen secara efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen terhadap manajemen dimaksudkan agar manajemen tidak melakukan penghindaran pajak.

Argumentasi diatas didukung oleh penelitian tentang proporsi komisaris independen yang telah diteliti oleh Sandy dan Lukviarman (2015), Khaoula (2013), serta Richardson dan Lanis (2007) yang memberikan hasil bahwa

komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, apabila semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin tinggi dalam pengawasan terhadap manajemen dan berakibat semakin rendah penghindaran pajak. Namun sebaliknya, apabila semakin kecil proporsi komisaris independen maka akan semakin tinggi penghindaran pajak.

Hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013), Zemzem dan Ftouhi (2013), serta Khaoula dan Ali (2012) memberikan hasil yang berbeda bahwa bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti jumlah komisaris independen tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang belum memberikan hasil yang konsisten dengan teori, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.**

#### **2.4.3. Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit yang merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen (Zarkasyi, 2008). Sehingga dalam menjalankan tugasnya seorang komite audit harus independen dan bekerja secara profesional. Karena komite audit dibentuk untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku merupakan tanggung jawab komite

audit di bidang tata kelola perusahaan. Oleh sebab itu dengan adanya komite audit semakin kecil kemungkinan perusahaan mempunyai kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak

Argumentasi diatas didukung oleh penelitian tentang komite audit yang telah diteliti oleh Sandy dan Lukviarman (2015) tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya penghindaran pajak ditentukan oleh komite audit. Dengan kata lain, apabila semakin banyak jumlah anggota komite audit maka akan semakin rendah penghindaran pajak. Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit jumlah anggota komite audit maka akan semakin tinggi penghindaran pajak.

Hasil penelitian Swingly dan Sukartha (2015) dan Kurniasih dan Sari (2013) memberikan hasil yang berbeda bahwa komite audit tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini berarti jumlah sedikit atau banyak komite audit pada suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi terhadap perilaku penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang belum memberikan hasil yang konsisten dengan teori, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.**

#### **2.4.4. Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak**

Prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana

laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan (Pramudito dan Sari, 2015). Menurut Watts (2003) penundaan terhadap pembayaran pajak perusahaan merupakan salah satu alasan penggunaan konservatisme. Dengan konservatisme, perusahaan dapat mengurangi *present value* pajak dengan jalan menunda pengakuan pendapatan atau laba dan mempercepat pengakuan dari biaya ataupun rugi. Dasar pengenaan pajak penghasilan badan adalah laba perusahaan. Manajemen yang ingin meminimalkan beban pajaknya, akan menggunakan konservatisme akuntansi untuk menurunkan laba perusahaan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Semakin perusahaan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangannya dengan mengecilkan laba maka pajak yang akan dikenakan juga akan kecil. Sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme akuntansi akan mendapatkan tingkat keagresifitasan pajak yang rendah.

Penelitian tentang konservatisme akuntansi yang telah diteliti oleh Pramudito dan Sari (2015) tentang pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode akuntansi yang konservatif tidak akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit

Hasil penelitian Pramudito dan Sari (2015) juga didukung oleh Jaya et al. (2014) yang juga menyatakan hal serupa. Hasil penelitian tentang pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak belum menemukan adanya perbedaan ataupun pertentangan. Dikarenakan masih minim yang melakukan penelitian menggunakan variabel ini.

Dalam penelitian ini akan menguji kembali variabel konservatisme akuntansi apakah memiliki hasil yang sama atau berbeda dengan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.**

#### **2.4.5. Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak**

Pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih meningkatkan kapasitas operasi perusahaan (Budiman dan Setiyono, 2012). Secara logika pertumbuhan penjualan mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Perusahaan yang penjualannya tumbuh secara cepat akan perlu untuk menambah aktiva tetapnya, sehingga pertumbuhan penjualan yang tinggi akan menyebabkan perusahaan mencari dana yang lebih besar (Pandey, 2001).

Peningkatan profitabilitas perusahaan meningkat maka pertumbuhan penjualan pun akan meningkat dan kinerja perusahaan semakin baik. Semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan, semakin meningkat pula laba suatu



penjualan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Jika pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat maka perusahaan akan lebih banyak mendapat keuntungan dan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin meningkat pertumbuhan penjualan maka semakin besar pajak yang akan dipungut. Maka dari itu perusahaan mencari dana yang lebih besar untuk dapat mengecilkan pajak yang terutang sehingga pajak yang dikenakan akan diminimalisir oleh perusahaan.

Penelitian tentang pertumbuhan penjualan yang telah diteliti oleh Swingly dan Sukartha (2015) tentang pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini menjelaskan pertumbuhan penjualan yang meningkat ataupun menurun tidak akan berpengaruh terhadap perbuatan penghindaran pajak. Belum banyak literatur yang menghubungkan antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak. Sehingga penelitian ini akan melakukan pengujian kembali tentang hubungan pertumbuhan penjualan terhadap dengan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H5: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

#### **2.4.6. *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:265) pemegang saham lebih menyukai hutang untuk sumber pendanaan eksternal karena bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak. Jadi semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*,

maka semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan, maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007).

Penelitian tentang *leverage* yang telah diteliti diantaranya oleh Swingly dan Sukartha (2015), Richardson dan Lanis (2007) tentang pengaruh *leverage* pada penghindaran pajak yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Hasil penelitian oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) dan Kurniasih dan Sari (2013) memberikan hasil yang berbeda bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menjelaskan bahwa rasio *leverage* yang tinggi atau rendah tidak akan memberi pengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang belum memberikan hasil yang konsisten dengan teori, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H6: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Perusahaan manufaktur terdiri dari 3 sektor industri yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi. Teknik penarikan sampel penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu metode penarikan sampel secara acak dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari awal periode pengamatan dan tidak *delisting* sampai akhir periode pengamatan.

2. Perusahaan yang memiliki nilai CETR < 1 (Chen et al., 2010).

Dalam menggambarkan perusahaan itu menghindar dari pajak adalah nilai pajak yang dibayarkan lebih kecil daripada laba sebelum pajak. Jika laba sebelum pajak lebih kecil daripada pajak yang dibayar maka perusahaan tidak akan membayar pajak.

3. Perusahaan yang memiliki laba sebelum pajak yang selalu positif.
4. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang selalu positif..
5. Laporan keuangan yang memiliki data – data mengenai variabel penelitian (kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite

audit, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan dan *leverage*) pada tahun 2013 - 2015.

### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh dari *www.sahamok.com*, situs resmi BEI (*www.idx.co.id*), dan situs resmi perusahaan sampel tahun 2013-2015.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumenter. Teknik dokumenter ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

### **3.4. Variabel Penelitian**

Variabel merupakan sesuatu yang menjadi pusat perhatian yang dapat memberikan pengaruh dan mempunyai nilai. Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi dan penyebab perubahan timbulnya variabel dependen (terikat).

#### **3.4.1. Variabel Dependen**

##### **3.4.1.1. Penghindaran Pajak**

Dalam penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini terdapat dua cara dalam menghitung penghindaran pajak yaitu *Effective Tax Rates*

(ETR) dan *Cash Effective Tax Rates* (CETR). Peneliti yang menggunakan proksi ETR sebagai alat ukurnya yaitu Paulo dan Gomes (2016), Sandy dan Lukviarman (2015), Khaoula (2013), Zemzem dan Ftouhi (2013), Khaoula dan Ali (2012), serta Richardson dan Lanis (2007). Sedangkan peneliti yang menggunakan CETR dalam mengukur penghindaran pajak yaitu Pramudito dan Sari (2015), Swingly dan Sukartha (2015), Ngadiman dan Puspitasari (2014), serta Kurniasih dan Sari (2013).

Penghindaran pajak dalam penelitian ini akan menggunakan alat ukur yaitu *Cash Effective Tax Rates* (CETR). Penghindaran pajak dengan model CETR dihitung dengan cara pajak yang dibayar tunai dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena dengan menggunakan CETR dapat melihat pajak yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan dari laporan arus kas (Chen et al., 2010). Menurut Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010) juga berpendapat bahwa pengukuran penghindaran pajak dengan menggunakan CETR baik digunakan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Berikut pengukuran penghindaran pajak:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pajak yang Dibayar Tunai}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### 3.4.2. Variabel Independen

#### 3.4.2.1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diukur dengan cara membandingkan saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang diterbitkan. Pengukuran ini seperti yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) dan Ngadiman dan Puspitasari (2014). Berikut pengukuran kepemilikan institusional:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

#### 3.4.2.2. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Proporsi dewan komisaris diukur dengan menggunakan persentase jumlah komisaris independen dengan jumlah seluruh dewan komisaris perusahaan pada sampel tahun yang diamati. Pengukuran ini seperti yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015), dan Kurniasih dan Sari (2013). Berikut pengukuran proporsi dewan komisaris independen:

$$\text{Proporsi dewan komisaris} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\%$$

#### 3.4.2.3. Komite Audit

Komite audit diukur dengan cara jumlah komite audit pada suatu perusahaan. Pengukuran ini seperti yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015). Berikut pengukuran komite audit:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota komite audit pada suatu perusahaan}$$

#### 3.4.2.4. Konservatisme Akuntansi

Menurut Ahmed dan Duellman (2007), serta Givoly dan Hayn (2000) pengukuran konservatisme akuntansi diukur dengan menggunakan akrual. Apabila akrual bernilai negatif, maka menunjukkan diterapkannya konservatisme akuntansi, hal ini disebabkan karena laba lebih rendah dari arus kas operasional yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu. Hal ini berarti perusahaan semakin banyak menangguhkan pendapatan yang belum terealisasi dan semakin cepat membebaskan biaya. Semakin negatif tingkat akrual rata-rata selama periode tertentu, maka prinsip akuntansi yang digunakan semakin konservatif.

Konservatisme akuntansi diukur dengan cara laba sebelum *extraordinary items* dikurangi dengan arus kas operasi ditambah biaya depresiasi dibagi dengan rata-rata total aktiva. Pengukuran ini seperti yang dilakukan oleh Pramudito dan Sari (2015), Jaya et al. (2014), Ahmed dan Duellman (2007), serta Givoly dan Hayn (2000). Berikut pengukuran konservatisme akuntansi:

$$\text{KONNAC} = \frac{\text{NI} - (\text{CFO} + \text{DEP})}{\text{RTA}}$$

Keterangan:

KONNAC : Tingkat konservatisme akuntansi

NI : Laba sebelum *extraordinary items*

CFO : Arus kas operasi

DEP : Biaya Depresiasi

RTA : Rata - rata total aktiva

Menurut Subramanyam dan Wild (2010) *extraordinary items* merupakan pos luar biasa yang dilaporkan setelah pajak, sebagai baris tersendiri dalam laporan laba rugi setelah laba operasi yang masih berlangsung. Ketika suatu perusahaan melaporkan pos luar biasa, laba operasi yang masih berlangsung disebut laba sebelum *extraordinary items (income before extraordinary items)*.

#### 3.4.2.5. **Pertumbuhan Penjualan**

Pertumbuhan penjualan diukur dengan cara penjualan akhir periode dikurangi dengan penjualan awal periode dan dibagi dengan penjualan awal periode. Pengukuran ini seperti yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015). Berikut pengukuran pertumbuhan penjualan:

$$\text{Pertumbuhan penjualan} = \frac{\text{Penjualan akhir periode} - \text{Penjualan awal periode}}{\text{Penjualan awal periode}}$$

#### 3.4.2.6. **Leverage**

*Leverage* merupakan penggunaan hutang jangka panjang maupun jangka pendek dari investor maupun dari kreditor untuk membiayai operasional dan aktiva perusahaan. *Leverage* diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio* (DER) dengan cara jumlah hutang jangka panjang dibagi dengan total aset. Pengukuran ini seperti yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) dan Richardson dan Lanis (2007). Berikut pengukuran *leverage*:

$$\text{DER} = \frac{\text{Hutang jangka panjang}}{\text{Total aset}}$$



Dari penjelasan diatas mengenai pengukuran variabel penelitian, maka dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1 Variabel Penelitian**

Variabel		Indikator	Skala	Sumber Data
Dependen	Penghin- daran Pajak	$CETR = \frac{\text{Pajak di Bayar Tunai}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio	Laporan Arus Kas dan L/R komprehensif
Independen	Kepemili- kan Institusio- nal	$\frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$	Rasio	Catatan Atas Laporan Keuangan
	Proporsi Dewan Komisaris	$\frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}}$	Rasio	Catatan Atas Laporan Keuangan
	Komite Audit	Semua anggota komite audit	Nomi nal	Catatan Atas Laporan Keuangan

Konservatisme Akuntansi	$\text{KONNAC} = \frac{\text{NI} - (\text{CFO} + \text{DEP})}{\text{RTA}}$	Rasio	Laporan Arus Kas, Laporan L/R Komprehensif, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Posisi Keuangan,
Pertumbuhan Penjualan	$\text{GROWTH} = \frac{\text{Penj.Akhir} - \text{Penj.Awal}}{\text{Penj.Awal}}$	Rasio	Laporan L/R Komprehensif
<i>Leverage</i>	$\text{DER} = \frac{\text{Hutang jangka panjang}}{\text{Total aset}}$	Rasio	Laporan Posisi Keuangan

### 3.5. Teknik Analisis Data

#### 3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara – cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian (Alhusin, 2003). Kegiatan – kegiatan yang termasuk pada kategori ini antara lain; kegiatan pengumpulan data, pengelompokan data, penentuan nilai dan fungsi statistik, pembuatan grafik, diagram dan gambar. Parameter yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah nilai rata – rata (mean), standar deviasi, dan kisaran skor (maksimum dan minimum).

### **3.5.2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah persamaan regresi yang telah ditentukan merupakan persamaan yang dapat menghasilkan estimasi yang tidak bias. Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### **a. Uji Normalitas**

Pengujian asumsi normalitas untuk menguji data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Jika distribusi data normal, maka analisis data dan pengujian hipotesis digunakan statistik parametrik. Untuk menguji hal tersebut digunakan *kolmogorov – smirnov test*. Suatu model dikatakan normal bila signifikansi residual lebih besar dari 0,05.

#### **b. Multikolinearitas**

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2005). Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan menggunakan nilai tolerance dan nilai VIF.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika beda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi hal tersebut digunakan grafik *scatterplot*. Metode ini dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu *standardized predicted value* (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya). Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2005) yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2005). Persamaan regresi

yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi.

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode *Durbin-Watson*. Jika nilai *Durbin-Watson* berkisar antara nilai batas atas ( $du$ ) maka diperkirakan tidak terjadi autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound ( $du$ ) dan  $(4 - du)$ , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound ( $dl$ ), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar daripada  $(4 - dl)$ , maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak di antara batas atas ( $du$ ) dan batas bawah ( $dl$ ) atau DW terletak antara  $(4 - du)$  dan  $(4 - dl)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

### **3.5.3. Pengujian Hipotesis**

Dalam penelitian ini analisis akan menggunakan SPSS versi 20. Alat analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Regresi berganda adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mencari pengaruh dari

beberapa variable independen terhadap variable dependen (Widarjono, 2005).

Model analisisnya adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{INST} + \beta_2 \text{PDK} + \beta_3 \text{KOM\_AUD} + \beta_4 \text{KONACC} + \beta_5 \text{GROWTH} + \beta_6 \text{DER} + e$$

Y = Penghindaran Pajak (CETR)

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6$  = Koefisien

INST = Kepemilikan Institusional

PDK = Proporsi Dewan Komisaris Independen

KOM\_AUD = Komite Audit

KONACC = Konservatisme Akuntansi

GROWTH = Pertumbuhan Penjualan

DER = *Leverage*

e = Error term (tingkat kesalahan error)

Hipotesis pada penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi liner berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (variabel independen) dengan variabel terikat (variabel dependen). Adapun untuk menguji hipotesis yang telah diajukan maka dilakukan pengujian sebagai berikut:

**a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ini menghitung seberapa besar variasi dari variable dependen dapat dijelaskan oleh variable independen. Nilai  $R^2$  berada diantara 0 –

1. Jika  $R^2$  sama dengan 1 maka variasi variable tidak bebas dapat dijelaskan sebesar 100% yang berarti nilai taksiran dari model empiric yang digunakan sama

dengan nilai actual variable tidak bebas sehingga nilai residual yang dihasilkan mempunyai nilai rata-rata nol (*zero mean of disturbance*), sebaliknya jika nilai  $R^2$  sama dengan 0 maka variasi variable tidak bebas tidak dapat dijelaskan.

**b. Uji t**

Menurut Ghozali (2005) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis nol diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis nol ditolak (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2015 dengan jumlah perusahaan 137. Penarikan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara acak dan menggunakan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penarikan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian**

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015	137
2	Perusahaan dengan nilai CETR>1	(3)
3	Perusahaan yang memiliki <i>pre-tax income</i> negatif	(56)
4	Perusahaan yang tidak mempunyai Kepemilikan Institusional	(2)
5	Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan negatif	(40)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria		36
Tahun pengamatan		3
Total sampel		108

Sumber : Data Diolah, 2017



## 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut. Hasil analisis deskriptif adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Uji Deskriptif Statistik**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	108	.06	.72	.2974	.13265
INST	108	.23	.98	.7280	.18032
PDK	108	.20	.80	.4015	.11097
KOM_AUD	108	3.00	5.00	3.1296	.41226
KONACC	108	-.64	.68	-.0264	.11439
GROWTH	108	.00	.48	.1383	.10822
DER	108	.02	.58	.1319	.12888
Valid N (listwise)	108				

Sumber: Output SPSS 20, 2017

## 4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

### 4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan uji statistik *kolmogorov-smirnov*. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

**Tabel 4.3 Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.12809375
	Absolute	.145
Most Extreme Differences	Positive	.145
	Negative	-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		1.505
Asymp. Sig. (2-tailed)		.022

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 20, 2017

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov di atas, dihasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,022. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini tidak terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di bawah 0,05. Model regresi tersebut belum layak untuk digunakan analisis selanjutnya. Untuk menormalkan data maka perlu dilakukan treatment yaitu menghapus data outlier. Data outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi – observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim (Ghozali, 2005:41). Data outlier ini harus dihapus dari pengamatan. Deteksi terhadap outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier yaitu dengan cara mengkonversi nilai data kedalam skor *standardized* atau yang bisa disebut *Z-score*. Untuk sampel besar standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada

kisaran 3 sampai 4. Batasan nilai tersebut cenderung menghasilkan normalitas yang lebih baik. Berikut rincian dalam menghapus data outlier:

3. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dengan nilai *Z-score* 4.53691 terdapat pada variabel komite audit pada tahun 2013 – 2015.
4. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dengan nilai *Z-score* 3.59059 terdapat pada variabel proporssi dewan komisaris pada tahun 2013 – 2015.
5. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) dengan nilai *Z-score* 3.45358 dan 3.32944 terdapat pada variabel *leverage* masing – masing pada tahun 2013 dan 2014.

Data outlier diatas akan dihapus dari sampel penelitian agar menghasilkan normalitas yang lebih baik sehingga layak untuk digunakan analisis selanjutnya. Dengan menggunakan data outlier maka jumlah sampel akan berkurang. Oleh karena itu akan menguji kembali analisis statistik deskriptif dan uji normalitas. Berikut rincian dalam pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan data outlier:

**Tabel 4.4 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian dengan Data Outlier**

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015	137
2	Perusahaan dengan nilai CETR>1	(3)
3	Perusahaan yang memiliki <i>pre-tax income</i> negatif	(56)
4	Perusahaan yang tidak mempunyai Kepemilikan Institusional	(2)
5	Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan negatif	(40)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria		36
Data Outlier		3

Jumlah sampel dengan data outlier	33
Tahun pengamatan	3
Total sampel yang digunakan dalam penelitian	99

Sumber : Data Diolah, 2017

#### 4.4 Analisis Statistik Deskriptif Setelah Eliminasi Outlier

Berdasarkan penarikan sampel pada tabel 4.4 diatas maka akan menguji kembali statistik deskriptif. Statistik deskriptif akan memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Berikut tabel 4.5 statistik deskriptif:

**Tabel 4.5 Uji Deskriptif Statistik Setelah Eliminasi Outlier**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	99	.06	.72	.3019	.13489
INST	99	.23	.98	.7346	.18230
PDK	99	.20	.67	.3936	.09074
KOM_AUD	99	3.00	4.00	3.0808	.27393
KONACC	99	-.64	.68	-.0273	.11851
GROWTH	99	.00	.48	.1399	.11124
DER	99	.02	.53	.1215	.11613
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Output SPSS 20, 2017

Dari hasil analisis deskriptif pada table 4.5 menunjukkan sebagai berikut:

1. Nilai minimum penghindaran pajak perusahaan adalah sebesar 0,06 yang diperoleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2013. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai penghindaran pajak paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,06. Sedangkan nilai maksimum penghindaran pajak adalah sebesar 0,72 yang diperoleh PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk

pada tahun 2014. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai penghindaran pajak paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,72. Nilai rata-rata penghindaran pajak tahun 2013 – 2015 adalah sebesar 0,3019 dengan standar deviasi sebesar 0,13489. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa perbandingan antara nilai pajak yang dibayar tunai terhadap laba sebelum pajak adalah sebesar 0,3019 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,13489 dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel penghindaran pajak adalah sebesar 0,13489.

2. Nilai minimum kepemilikan institusional adalah sebesar 0,23 yang diperoleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk pada tahun 2013-2015. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai kepemilikan institusional paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,23. Sedangkan nilai maksimum kepemilikan institusional adalah sebesar 0,98 yang diperoleh PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk pada tahun 2013 – 2015, PT HM Sampoerna Tbk pada tahun 2013 – 2014, dan PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk pada tahun 2013 – 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai kepemilikan institusional paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,98. Nilai rata-rata kepemilikan institusional tahun 2013 – 2015 adalah sebesar 0,7346 dengan standar deviasi sebesar 0,18230. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kepemilikan institusional di Indonesia adalah sebesar 73.46% sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,18230 dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 0,18230.

3. Nilai minimum proporsi dewan komisaris adalah sebesar 0,20 yang diperoleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2013-2015. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai proporsi dewan komisaris paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,20. Sedangkan nilai maksimum proporsi dewan komisaris adalah sebesar 0,67 yang diperoleh PT Jembo Cable Company Tbk. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai proporsi dewan komisaris paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,67. Nilai rata-rata proporsi dewan komisaris tahun 2013 – 2015 adalah sebesar 0,3936 dengan standar deviasi sebesar 0,09074. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa tingkat proporsi dewan komisaris di Indonesia adalah sebesar 39.36% sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,09074 dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel proporsi dewan komisaris adalah sebesar 0,09074.
4. Nilai minimum komite audit adalah sebesar 3,00. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai komite audit paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar 3,00. Sedangkan nilai maksimum komite audit adalah sebesar 4,00 yang diperoleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2013 – 2015, PT Darya Varia Laboratoria Tbk pada tahun 2013 – 2014 dan PT Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2013 – 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai komite audit paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar 4,00. Nilai rata-rata komite audit tahun 2013 – 2015 adalah sebesar 3,0808 dengan standar deviasi sebesar 0,27393 yang dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel komite audit adalah sebesar 0,27393.

5. Nilai minimum konservatisme akuntansi adalah sebesar  $-0,64$  yang diperoleh PT Nippon Indosari Corporindo Tbk pada tahun 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai konservatisme akuntansi paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar  $-0,64$ . Sedangkan nilai maksimum konservatisme akuntansi adalah sebesar  $0,68$  yang diperoleh PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk pada tahun 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai konservatisme akuntansi paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar  $0,68$ . Nilai rata-rata konservatisme akuntansi tahun 2013 – 2015 adalah sebesar  $-0,0273$  dengan standar deviasi sebesar  $0,11851$ . Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa tingkat konservatisme akuntansi di Indonesia adalah sebesar  $-2,73\%$  sedangkan nilai standar deviasi sebesar  $0,11851$  dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel konservatisme akuntansi adalah sebesar  $0,11851$ .
6. Nilai minimum pertumbuhan penjualan adalah sebesar  $0,00$  yang diperoleh PT Indo Kordsa Tbk dan PT Mandom Indonesia Tbk masing – masing pada tahun 2015 dan PT Darya Varia Laboratoria Tbk pada tahun 2014. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai pertumbuhan penjualan paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar  $0,00$ . Sedangkan nilai maksimum pertumbuhan penjualan adalah sebesar  $0,48$  yang diperoleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2013. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai pertumbuhan penjualan paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar  $0,48$ . Nilai rata-rata pertumbuhan penjualan tahun 2013 – 2015 adalah sebesar  $0,1399$  dengan standar deviasi sebesar  $0,11124$ . Nilai rata-

rata tersebut dapat diartikan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan di Indonesia adalah sebesar 13,99% sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,11124 dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel pertumbuhan penjualan adalah sebesar 0,11124.

7. Nilai minimum *leverage* adalah sebesar 0,02 yang diperoleh PT Semen Baturaja Persero Tbk pada tahun 2014 – 2015, PT Ekadharmatama Tbk pada tahun 2013, PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2013 – 2015, PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2013 - 2014, dan PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk pada tahun 2013. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai *leverage* paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,02. Sedangkan nilai maksimum *leverage* adalah sebesar 0,53 yang diperoleh PT Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2014. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai *leverage* paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,53. Nilai rata-rata *leverage* tahun 2013 – 2015 adalah sebesar 0,1215 dengan standar deviasi sebesar 0,11613. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa tingkat *leverage* di Indonesia adalah sebesar 12,15% sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,11613 dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel *leverage* adalah sebesar 0,11613.

#### **4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik Setelah Eliminasi Outlier**

##### **4.5.1 Hasil Uji Normalitas Setelah Eliminasi Outlier**

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. Oleh sebab itu uji normalitas akan diujikan kembali untuk mendapatkan tingkat normalitas setelah dilakukan pengeliminasian outlier. Berikut adalah hasil uji



normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* setelah dilakukan pengelimitasian data outlier:

**Tabel 4.6 Uji Normalitas Setelah Eliminasi Outlier**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.12256242
	Absolute Most Extreme Differences	.133
	Positive	.133
	Negative	-.051
Kolmogorov-Smirnov Z		1.319
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS 20, 2017

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov di atas, dihasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,062. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di atas 0,05.

#### 4.5.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji ini untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya multikolinieritas. Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas:

**Tabel 4.7 Uji Multikolinieritas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.564	.180		3.139	.002		
INST	-.033	.073	-.044	-.451	.653	.925	1.082
PDK	.412	.148	.277	2.788	.006	.906	1.103
1 KOM_AUD	-.134	.053	-.272	-2.510	.014	.764	1.308
KONACC	.229	.119	.201	1.929	.057	.825	1.212
GROWTH	-.132	.117	-.109	-1.130	.262	.963	1.039
DER	.310	.135	.267	2.298	.024	.667	1.500

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS 20, 2017

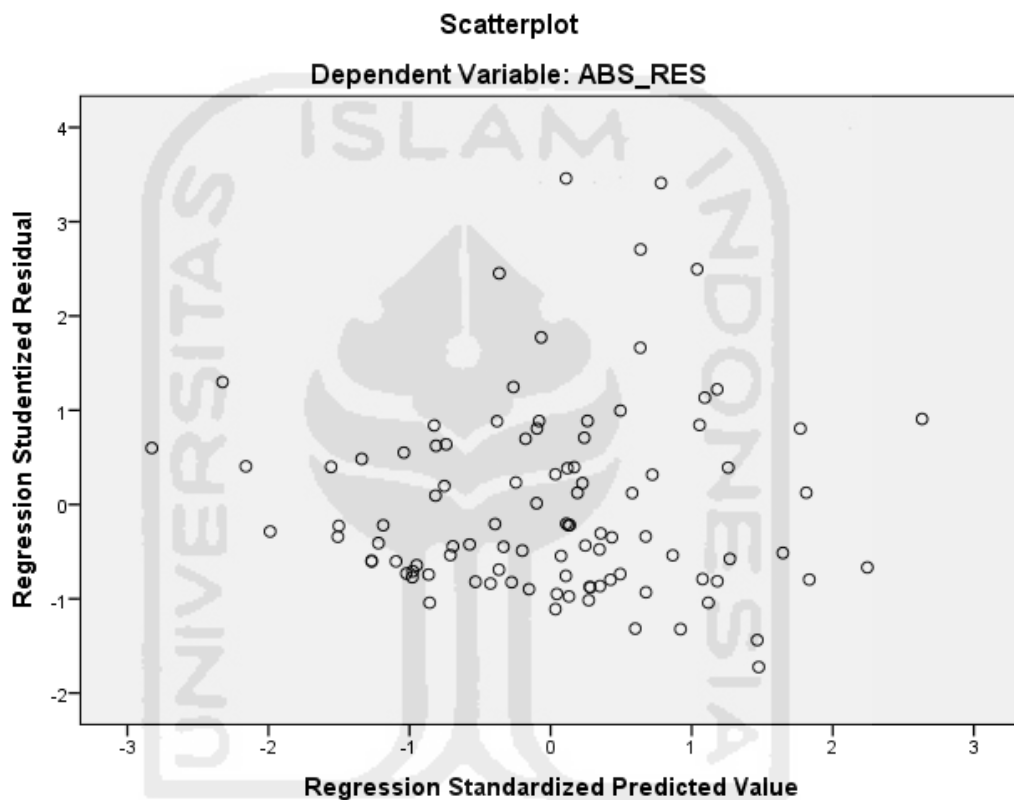
Berdasarkan Tabel 4.7 dari hasil analisis uji multikolinieritas di atas, maka dihasilkan nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, yaitu 1.082 untuk variabel kepemilikan institusional, 1.103 untuk variabel proporsi dewan komisaris independen, 1.308 untuk variabel komite audit, 1.212 untuk variabel konservatisme akuntansi, 1.039 untuk variabel pertumbuhan penjualan, 1.500 untuk variabel *leverage*. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### 4.5.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplots*, jika grafik terlihat titik-titik

menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastistas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini :

**Gambar 4.1 Grafik *Scatterplots***



Sumber: Output SPSS 20, 2017

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas di atas, pada grafik *scatterplot* terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

#### 4.5.4 Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan adanya kesalahan pengganggu periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji *durbin watson*. Nilai D-W dari model regresi berganda terpenuhi jika nilai  $d_u < d_{hitung} < d_4 - d_u$ . Hasil analisis uji autokorelasi dengan uji *durbin watson* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.418 <sup>a</sup>	.174	.121	.12650	2.133

a. Predictors: (Constant), DER, GROWTH, INST, PDK, KONACC, KOM\_AUD

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS 20, 2017

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dihasilkan *durbin Watson* sebesar 2.133. Nilai ini akan dibandingkan dengan DW tabel dengan jumlah sample 99, jumlah variabel bebas 6 dan tingkat kepercayaan 5% di dapat nilai batas bawah ( $d_l$ ) = 1,5467 dan batas atas ( $d_u$ ) = 1,8029. Oleh karena nilai DW 2,133 berada di antara batas atas ( $d_u$ ) = 1,8029 dan ( $4 - d_u$ ) = 2,1971, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 di atas. Dari hasil analisis regresi

linier berganda di atas, maka model persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.564 - 0.033INST + 0.412PDK - 0,134KOM\_AUD + 0,229KONACC - 0.132GROWTH + 0,310DER$$

Dari hasil model persamaan regresi diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Nilai intercept konstanta sebesar 0,564. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka besarnya penghindaran pajak akan sebesar 0,564.
2. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusional sebesar -0,033. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila kepemilikan institusional bertambah satu persen, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,033 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel proporsi dewan komisaris sebesar 0,412. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila proporsi dewan komisaris bertambah satu persen, maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,412 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel komite audit sebesar -0,134. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila komite audit bertambah satu persen, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,134 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
5. Nilai koefisien regresi variabel konservatisme akuntansi sebesar 0,229. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila konservatisme akuntansi bertambah satu

persen, maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,229 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

6. Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan penjualan -0,132. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila pertumbuhan penjualan bertambah satu persen, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,132 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
7. Nilai koefisien regresi variabel *leverage* sebesar 0,310. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila *leverage* bertambah satu persen, maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,310 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

#### **4.6.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.121. Hal ini menandakan bahwa variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan dan *leverage* hanya dapat menjelaskan 12,1% variasi penghindaran pajak. sedangkan sisanya yaitu 87,9% (100% - 12,1%) dijelaskan oleh variabel – variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

#### **4.6.2 Hasil Uji Statistik T**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji regresi secara parsial telah ditunjukkan pada Tabel 4.7 diatas. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pengujian Hipotesis pertama

Hasil dari pengujian signifikansi koefisien regresi variabel kepemilikan institusional, hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Besarnya koefisien regresi kepemilikan institusional yaitu -0,033 dan nilai signifikansi sebesar 0,653. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ ; maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena signifikansi  $0,653 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis pertama penelitian ini tidak terbukti.

### 2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil dari pengujian signifikansi koefisien regresi variabel proporsi dewan komisaris, hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Besarnya koefisien regresi proporsi dewan komisaris yaitu 0,412 dan nilai signifikansi sebesar 0,006. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ ; maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena signifikansi  $0,006 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis kedua penelitian ini tidak terbukti.

### 3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil dari pengujian signifikansi koefisien regresi variabel komite audit, hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa komite audit

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Besarnya koefisien regresi komite audit yaitu -0,134 dan nilai signifikansi sebesar 0,014. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ ; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi  $0,014 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis ketiga penelitian ini terbukti.

#### 4. Pengujian Hipotesis Keempat

Hasil dari pengujian signifikansi koefisien regresi variabel konservatisme akuntansi, hipotesis keempat penelitian ini menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Besarnya koefisien regresi konservatisme akuntansi yaitu 0,229 dan nilai signifikansi sebesar 0,057. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ ; maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena signifikansi  $0,057 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis keempat penelitian ini tidak terbukti.

#### 5. Pengujian Hipotesis Kelima

Hasil dari pengujian signifikansi koefisien regresi variabel pertumbuhan penjualan, hipotesis kelima penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Besarnya koefisien regresi pertumbuhan penjualan yaitu -0,132 dan nilai signifikansi sebesar 0,262. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ ; maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena signifikansi  $0,262 > 0,05$  sehingga



dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis kelima penelitian ini tidak terbukti.

## 6. Pengujian Hipotesis Keenam

Hasil dari pengujian signifikansi koefisien regresi variabel, hipotesis keenam penelitian ini menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Besarnya koefisien regresi *leverage* yaitu 0,310 dan nilai signifikansi sebesar 0,024. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ ; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi  $0,024 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis keenam penelitian ini tidak terbukti.

## 4.7 Pembahasan

### 4.7.1 Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat bahwa hubungan variabel kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,653. Nilai tersebut lebih dari 0,05, maka diperoleh bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar -0,033. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki arah negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini belum dapat membuktikan hipotesis pertama penelitian.

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak tidak ditentukan oleh variabel kepemilikan institusional. Dengan kata lain tinggi atau rendahnya persentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini belum dapat membuktikan pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank kecuali kepemilikan individual. Besar persentase kepemilikan institusional perusahaan sampel adalah sebesar 0,7346 atau 73,46%. Walaupun memiliki persentase yang cukup besar namun kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan tidak mampu menjadi *controller* atas kegiatan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan tersebut kepada dewan komisaris, karena itu merupakan tugas dewan komisaris yang mewakili pemilik institusional. Akan tetapi ada atau tidaknya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan tetap saja akan terjadi penghindaran pajak (Fitri Damayanti dan Susanto, 2015). Dengan demikian kepemilikan institusional belum dapat memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan penghindaran pajak.

#### **4.7.2 Proporsi Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis kedua dapat dilihat bahwa hubungan variabel proporsi dewan komisaris dengan penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,006. Nilai tersebut lebih rendah dari 0,05, maka diperoleh hasil bahwa proporsi dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi proporsi dewan komisaris sebesar 0,412. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini belum dapat membuktikan hipotesis kedua yaitu proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan masih terdapat perusahaan dengan proporsi komisaris independen kurang dari 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dengan lebih banyaknya dewan komisaris yang terafiliasi dibanding dengan komisaris independen maka proses monitoring terhadap manajer menjadi kurang efektif sehingga celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak semakin tinggi. Disamping itu komisaris independen yang seharusnya dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak di dalam perusahaan tidak berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pengangkatan komisaris independen sebagian berdasarkan atas penghargaan, hubungan keluarga dan nepotisme (Effendi, 2009). Dengan adanya penghargaan, maka komisaris independen dapat melakukan penghindaran pajak yang diminta oleh manajer agar mendapatkan penghargaan tersebut. Sehingga semakin tinggi proporsi dewan komisaris maka semakin tinggi pula tindakan

penghindaran pajak. Oleh sebab itu, seharusnya persyaratan untuk dapat diangkat sebagai komisaris independen seharusnya sangat ketat, antara lain memiliki integritas dan kompetensi yang memadai sehingga kinerja komisaris dapat lebih ditingkatkan sehingga penghindaran pajak dalam perusahaan dapat diminimalisir.

#### **4.7.3 Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat bahwa hubungan variabel komite audit dengan penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,014. Nilai tersebut lebih rendah dari 0,05, maka diperoleh hasil bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi komite audit sebesar -0,134. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini dapat membuktikan hipotesis ketiga yaitu komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikannya setiap perusahaan selama tahun pengamatan telah memenuhi persyaratan dari BAPEPAM yaitu keanggotaan komite audit sekurang – kurangnya adalah 3. Dengan begitu proses monitoring komite audit terhadap manajemen akan lebih efektif, sehingga tindakan penghindaran pajak dapat diminimalisir.

#### 4.7.4 Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis keempat dapat dilihat bahwa hubungan variabel konservatisme akuntansi dengan penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,057. Nilai tersebut lebih dari 0,05, maka diperoleh hasil bahwa konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi konservatisme akuntansi sebesar 0,229. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konservatisme akuntansi memiliki arah positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini belum dapat membuktikan hipotesis keempat yaitu konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Pramudito dan Sari (2015) dan Jaya et al. (2014) bahwa konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar persentase konservatisme akuntansi perusahaan sampel adalah sebesar 71 % atau 70 perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi dan sisanya 29 perusahaan tidak menerapkan konservatisme akuntansi. Seharusnya dengan prosentase konservatisme akuntansi yang cukup besar diharapkan dapat meminimalisasikan penghindaran pajak. Hal ini kemungkinan dikarenakan prinsip konservatisme merupakan hasil dari penundaan pengakuan terhadap laba dan aktiva, sementara dengan segera mengakui beban, dan utang. Hal ini dapat mengakibatkan *understatement* terhadap laba yang dilaporkan untuk periode saat ini, tetapi *overstatement* (lebih

besar dari yang seharusnya terhadap laba yang dilaporkan untuk periode yang akan datang (Savitri, 2016). Pada waktu *understatement* atau laba yang dilaporkan lebih rendah maka pajak yang dikenakan juga rendah. Namun pada waktu *overstatement* laba yang dilaporkan juga lebih besar sehingga pajak yang dikenakan juga akan lebih besar. Pada waktu *overstatement* tersebut kemungkinan manajemen dapat melakukan penghindaran pajak karena pajak yang dibebankan menjadi lebih tinggi. Sehingga penerapan prinsip konservatisme tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **4.7.5 Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis kelima dapat dilihat bahwa hubungan variabel pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,262. Nilai tersebut lebih dari 0,05, maka diperoleh hasil bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi pertumbuhan penjualan yaitu -0,132. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki arah negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini belum dapat membuktikan hipotesis kelima yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Singly dan Sukartha (2015) bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Memperkecil penghasilan dengan cara hanya melaporkan

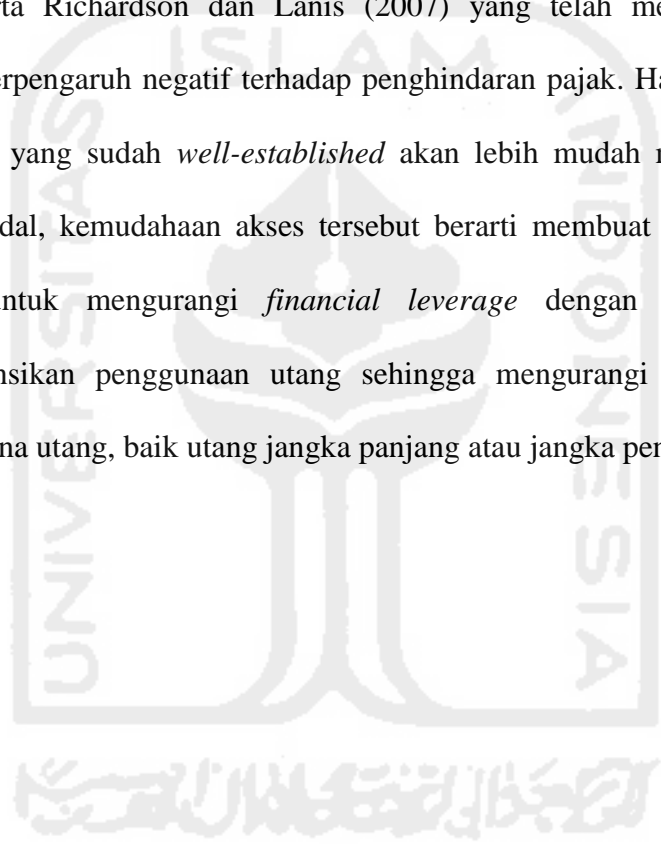
sebagian, merendahkan harga jual, memilih menjual kepada pengusaha non PKP dalam bentuk faktur pajak sederhana agar lebih mudah tidak melaporkan penjualannya (Hanum, 2005). Hal tersebut dapat memperkecil pajak yang dipungut dari segi penjualan namun bukan berarti perusahaan dengan cara demikian dapat menghindari pajak yang lain seperti PPN, PPNBM, BPHTB, dan PBB yang tetap menjadi kewajiban perusahaan. Disamping itu melihat Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 (1) UU PPh yang menjadi objek PPh badan diantaranya adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, hadiah dari undian dan penghargaan, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan, bunga, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, royalti atau imbalan, keuntungan selisih kurs mata uang asing dll. Dimana objek pajak tersebut diluar dari kegiatan penjualan atau *active income* yang tetap harus dibayar oleh perusahaan. Dengan demikian pertumbuhan penjualan yang meningkat ataupun menurun tidak akan ada pengaruhnya terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

#### **4.7.6 Leverage terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini adalah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis keenam dapat dilihat bahwa hubungan variabel *leverage* dengan penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,024. Nilai tersebut lebih rendah dari 0,05, maka diperoleh hasil bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi *leverage* sebesar 0,310. Hasil penelitian ini

menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini belum dapat membuktikan hipotesis keenam yaitu *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015), serta Richardson dan Lanis (2007) yang telah membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini kemungkinan perusahaan yang sudah *well-established* akan lebih mudah memperoleh modal dipasar modal, kemudahan akses tersebut berarti membuat wajib pajak badan memilih untuk mengurangi *financial leverage* dengan meminilalisir dan mengefisiensikan penggunaan utang sehingga mengurangi beban tetap yang timbul karena utang, baik utang jangka panjang atau jangka pendek (Sofia, 2014).





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan.
2. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya proporsi dewan komisaris akan mempengaruhi penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tingkat penggunaan konservatisme akuntansi yang tinggi atau rendah tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan.
5. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan yang meningkat ataupun menurun tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan.

6. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tinggi atau rendahnya *leverage* akan mempengaruhi penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

1. Nilai koefisien determinasi sebesar 12,1%, sehingga masih terdapat 87,9% variabel independen lain yang mempengaruhi penghindaran pajak.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data dari perusahaan manufaktur.

## **5.3 Saran**

Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka dapat diberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain seperti jumlah dewan komisaris, dualitas, ukuran perusahaan, intensitas modal dan karakter eksekutif.
2. Penelitian selanjutnya agar memperluas sampel dan periode pengamatan. Pengujian pada sektor industri lain, seperti seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta memperpanjang periode pengamatan dapat meningkatkan generalisasi hasil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. (2016). Aktivitas Ilegal dan Penghindaran Pajak, Indonesia Kehilangan US\$6,6 Triliun.
- Ahmed, A. S., & Duellman, S. (2007). Accounting Conservatism and Board of Director Characteristics: An empirical analysis. *Journal of Accounting & Economics*, 43, 411–437. <http://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.01.005>
- Alhusin, S. (2003). *Aplikasi Statistik Praktis dengan Menggunakan SPSS 10 for Windows* (Kedua). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifin, Z. (2005). *Teori Keuangan dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Ekonisia.
- BAPEPAM. (2004). *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit* (No. KEP-29/PM/2004). Jakarta.
- Basu, S. (1997). The Conservatism Principle and The Asymmetric Timeliness of Earnings. *Journal of Accounting & Economics*, 24, 3–37. <http://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01151.x>
- Binhadi, Husein, Y., Habsjah, I., Tumbuan, F. B. G., Sinaga, H., Pohan, A. P., ... Maharesi, Y. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. In *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (2016th ed., p. 30). Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance. Retrieved from [www.governance-indonesia.or.id](http://www.governance-indonesia.or.id)
- BPS. (n.d.). indo\_101\_19. BPS.
- Brotodihardjo, S. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Ketiga). Bandung: PT Eresco, Bandung.
- Budiman, J., & Setiyono. (2012). Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). In *SNA 15 Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat 20-23 Sept 2012*.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <http://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Dwimulyani, S. (2010). Konservatisme Akuntansi dan Sengketa Pajak Penghasilan: Suatu Investigasi Empiris. In *SNA XIII Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.

- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance, 85(4), 1163–1189. <http://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Effendi, M. A. (2009). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. (Krista, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Fitri Damayanti, T., & Susanto. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Resiko Perusahaan dan Return on Assets terhadap Tax Avoidance. *Esensi Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 187–206.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Givoly, D., & Hayn, C. (2000). The Changing Time-Series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative? *Nting and Economics Journal of Accounting and Economics*, 29, 287–320. [http://doi.org/10.1016/S0165-4101\(00\)00024-0](http://doi.org/10.1016/S0165-4101(00)00024-0)
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2016). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hanum, A. N. (2005). Permasalahan Pajak Indonesia. *Value Added*, 2(1), 1–9.
- Hartono, J. (2014). *Teori dan Praktik Portofolio dengan Excel* (1st ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta Pusat: Ikatan Akuntan Indonesia.
- InsideTax. (2013). Di Balik Suap Pajak. *InsideTax Media Tren Perpajakan*, (15), 1–68.
- Jaya, T. E., Arafat, M. Y., & Kartika, D. (2014). Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi dan Tax Avoidance. In *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4* (pp. 1–5). <http://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [http://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](http://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

- Khaoula, A. (2013). Does Corporate Governance Affect Tax Planning? Evidence from American Companies. *International Journal of Advanced Research*, 1(10), 864–873.
- Khaoula, A., & Ali, Z. M. (2012). The Board Of Directors and The Corporate Tax Planning: Empirical Evidence from Tunisia. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 2(2), 142–157. <http://doi.org/10.5296/ijaf.v2i2.2525>
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2009). Institutional Ownership and Tax Aggressiveness \*. In *AAA 2010 Financial Accounting and Reporting (FARS) Paper* (pp. 0–42).
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets , Leverage , Corporate Governance , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(Februari), 58–66.
- Low, A. (2006). “*Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation*”. *Fisher College of Business Working Paper, 03-003*. Mills, L dan K. Newberry. 2001. *The Influence of Tax and Nontax Costs on Book-Tax Reporting Differences. The Journal of the American Taxation Association* (Vol. 23). Singapore.
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, XVIII(03), 408–421.
- OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Pub. L. No. 30/POJK.04/2014 (2014). Jakarta.
- Pandey, I. M. (2001). *Capital Structure and The Firm Characteristics: Evidence From an Emerging Market* (No. 2001-10-04). Delhi.
- Paulo, A., & Gomes, M. (2016). Corporate Governance Characteristics as a Stimulus to Tax Management. *Revista Contabilidade & Finanças*, 27(71), 149–168. <http://doi.org/10.1590/1808-057x201500750>
- Pohan, C. A. (2011). *Optimizing Corporate tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. (D. N. Sutini, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Pohan, H. T. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Aktual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi , Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 4(2), 113–135.

- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. In *SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram 24-27 Sept 2014* (pp. 1–27).
- Pramudito, B. W., & Sari, M. M. R. (2015). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13, 705–722.
- Raharja, N., & Sandra, A. (2014). Pengaruh Insentif Pajak dan Faktor Nonpajak terhadap Konservatisme Akuntansi Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI. In *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4* (pp. 1–15).
- Raharjaputra, H. S. (2009). *Manajemen Keuangan dan Akuntansi untuk Eksekutif Muda* (Cetakan Pe). Jakarta: Salemba Empat.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26, 689–704. <http://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Samsul, M. (2015). *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio* (2nd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *JAAI*, 19(Desember), 85–98.
- Santoso, T. B., & Muid, D. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(4), 1–12.
- Savitri, E. (2016). *Konservatisme Akuntansi Cara Pengukuran, Tinjauan Empiris dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. (Musfialdi, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Sahila.
- Sofia, O. (2014). Pengaruh Leverage Dan Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak.
- Subramanyam, K. ., & Wild, J. J. (2010). *Financial Statement Analysis*. (Tim Salemba Empat, Ed.) (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage , Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbakan*, 16(2), 167–177. Retrieved from <http://jurkubank.wordpress.com>

- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47–62.
- Tarjo. (2008). *Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost of Equity Capital*.
- Undang- Undang No 36 Tahun 2008. Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (2008). Indonesia.
- Wahyuni, S. (2012). Analisis Biaya Volume Laba Melalui Alokasi Biaya Bersama Sebagai Perencanaan Laba. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 3(2). <http://doi.org/10.18860/em.v3i2.2342>
- Watts, R. L. (2003). *Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications* (May 16 No. FR 03-16). Rochester, New York. Retrieved from <http://ssrn.com/abstract=414522>
- Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: UII.
- Zarkasyi, M. W. (2008). *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya* (1st ed.). Bandung: CV Alfabeta.
- Zemzem, A., & Ftouhi, K. (2013). The Effects of Board of Directors ' Characteristics on Tax Aggressiveness. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(4), 140–148.

## LAMPIRAN 1

### SAMPEL PERUSAHAAN SEBELUM ELIMINASI OUTLIER

NO	SEKTOR	KODE EMITEN	NAMA PERUSAHAAN
1	Industri Dasar dan Kimia	SMBR	Semen Baturaja Persero Tbk
2		TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk
3		INAI	Indal Aluminium Industry Tbk
4		PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk
5		EKAD	Ekadharma Tape Industry Tbk
6		SOBI	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk
7		SRSN	Indo Acidatama Tbk
8		AKPI	Argha Karya Prima Ind Tbk
9		CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
10		JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
11		ALDO	Alkindo Nusantara Tbk
12	Aneka Industri	BRAM	Indo Kordsa Tbk
13		PRAS	Prima Alloy Steel Tbk
14		SMSM	Selamat Sempurna Tbk
15		SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk
16		TRIS	Trisula International Tbk
17		BATA	Sepatu Bata Tbk
18		JECC	Jembo Cable Company Tbk
19	Industri Barang Konsumsi	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
20		ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
21		INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
22		ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
23		SKLT	Sekar Laut Tbk
24		STTP	Siantar Top Tbk
25		ULTJ	Ultra Jaya Milk Tbk
26		GGRM	Gudang garam Tbk
27		HMSP	HM Sampoerna Tbk
28		WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk
29		DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
30		KAEF	Kimia Farma Tbk
31		KLBF	Kalbe Farma Tbk
32		SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
33		TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk



34		ADES	Akasha Wira International Tbk
35		TCID	Mandom Indonesia Tbk
36		UNVR	Unilever Indonesia Tbk



## LAMPIRAN 2

### SAMPEL PERUSAHAAN SETELAH ELIMINASI OUTLIER

No.	SEKTOR	EMITEN	NAMA PERUSAHAAN
1	Industri Dasar dan Kimia	SMBR	Semen Baturaja Persero Tbk
2		TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk
3		INAI	Indal Aluminium Industry Tbk
4		PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk
5		EKAD	Ekadharma Tape Industry Tbk
6		SOBI	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk
7		SRSN	Indo Acidatama Tbk
8		AKPI	Argha Karya Prima Ind Tbk
9		JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
10		ALDO	Alkindo Nusantara Tbk
11	Aneka Industri	BRAM	INDO KOrDSA Tbk
12		PRAS	Prima Alloy Steel Tbk
13		SMSM	Selamat Sempurna Tbk
14		TRIS	Trisula International Tbk
15		BATA	Sepatu Bata Tbk
16		JECC	Jembo Cable Company Tbk
17	Industri Barang Konsumsi	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
18		ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
19		INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
20		ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
21		SKLT	Sekar Laut Tbk
22		STTP	Siantar Top Tbk
23		ULTJ	Ultra Jaya Milk Tbk
24		GGRM	Gudang garam Tbk
25		HMSP	HM Sampoerna Tbk
26		WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk
27		DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
28		KAEF	Kimia Farma Tbk
29		KLBF	Kalbe Farma Tbk
30		SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
31		TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk
32		ADES	Akasha Wira International Tbk
33	TCID	Mandom Indonesia Tbk	

### LAMPIRAN 3 DATA PENELITIAN

EMITEN	CETR			INST			PDK		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
SMBR	0.255	0.170	0.142	0.762	0.762	0.762	0.400	0.400	0.400
TOTO	0.284	0.260	0.308	0.962	0.962	0.924	0.250	0.400	0.400
INAI	0.598	0.326	0.300	0.659	0.887	0.673	0.500	0.500	0.500
PICO	0.410	0.197	0.134	0.940	0.940	0.940	0.500	0.333	0.333
EKAD	0.263	0.315	0.256	0.754	0.754	0.754	0.500	0.500	0.500
SOBI	0.220	0.166	0.404	0.980	0.980	0.980	0.333	0.333	0.333
SRSN	0.316	0.273	0.466	0.780	0.780	0.780	0.375	0.375	0.375
AKPI	0.149	0.085	0.671	0.586	0.586	0.586	0.333	0.333	0.333
JPFA	0.366	0.717	0.190	0.576	0.576	0.578	0.333	0.333	0.500
ALDO	0.162	0.373	0.297	0.584	0.584	0.584	0.333	0.333	0.333
BRAM	0.671	0.325	0.283	0.658	0.658	0.658	0.429	0.400	0.400
PRAS	0.332	0.236	0.283	0.541	0.541	0.541	0.333	0.333	0.333
SMSM	0.202	0.251	0.258	0.581	0.581	0.581	0.333	0.333	0.333
TRIS	0.274	0.438	0.323	0.698	0.671	0.670	0.333	0.333	0.333
BATA	0.411	0.350	0.269	0.871	0.872	0.871	0.400	0.400	0.400
JECC	0.628	0.306	0.332	0.901	0.901	0.901	0.667	0.667	0.667
AISA	0.057	0.075	0.134	0.557	0.621	0.630	0.200	0.200	0.200
ICBP	0.309	0.298	0.297	0.805	0.805	0.805	0.429	0.500	0.333
INDF	0.423	0.385	0.470	0.501	0.501	0.501	0.375	0.375	0.375
ROTI	0.265	0.190	0.202	0.708	0.708	0.708	0.333	0.333	0.333
SKLT	0.353	0.278	0.564	0.961	0.961	0.961	0.333	0.333	0.333
STTP	0.219	0.318	0.221	0.568	0.568	0.568	0.500	0.500	0.500
ULTJ	0.390	0.335	0.159	0.466	0.466	0.445	0.333	0.333	0.333
GGRM	0.257	0.229	0.212	0.755	0.755	0.755	0.500	0.500	0.500
HMSP	0.252	0.292	0.274	0.982	0.982	0.925	0.500	0.500	0.400
WIIM	0.195	0.416	0.233	0.225	0.225	0.225	0.333	0.333	0.333
DVLA	0.332	0.464	0.244	0.930	0.930	0.930	0.429	0.429	0.333
KAEF	0.349	0.146	0.202	0.900	0.900	0.900	0.400	0.400	0.400
KLBF	0.253	0.235	0.257	0.567	0.567	0.567	0.333	0.333	0.500
SQBB	0.256	0.267	0.302	0.980	0.980	0.980	0.333	0.333	0.333
TSPC	0.551	0.576	0.647	0.773	0.775	0.782	0.600	0.500	0.500
ADES	0.083	0.241	0.287	0.919	0.919	0.919	0.333	0.333	0.333
TCID	0.281	0.279	0.090	0.738	0.738	0.738	0.400	0.400	0.500

**LAMPIRAN 3 DATA PENELITIAN (LANJUTAN)**

EMITEN	KOM_AUD			KONACC		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
SMBR	3	3	3	-0.018	-0.044	-0.125
TOTO	3	3	3	-0.068	-0.038	-0.019
INAI	3	3	3	-0.083	-0.071	-0.031
PICO	3	3	3	0.012	-0.036	-0.084
EKAD	3	3	3	0.018	0.067	-0.167
SOBI	3	3	3	-0.063	-0.065	0.678
SRSN	3	3	3	-0.066	-0.012	0.172
AKPI	3	3	3	0.002	-0.167	0.003
JPFA	3	3	3	0.003	-0.107	-0.097
ALDO	3	3	3	-0.078	0.028	0.025
BRAM	3	3	3	-0.081	-0.086	-0.095
PRAS	3	3	3	-0.019	-0.026	-0.033
SMSM	3	3	3	-0.119	-0.072	-0.100
TRIS	3	3	3	0.033	0.047	-0.105
BATA	3	3	3	-0.031	-0.035	0.155
JECC	3	3	3	0.100	-0.033	-0.034
AISA	4	4	4	0.021	-0.017	-0.028
ICBP	3	3	3	-0.005	-0.071	-0.043
INDF	3	3	3	-0.070	-0.086	-0.036
ROTI	3	3	3	-0.099	-0.123	-0.635
SKLT	3	3	3	-0.089	-0.072	-0.076
STTP	3	3	3	0.004	-0.076	-0.039
ULTJ	3	3	3	0.001	0.004	-0.097
GGRM	3	3	3	0.013	0.039	0.026
HMSP	3	3	3	-0.015	-0.048	0.285
WIIM	3	3	3	0.120	0.028	0.019
DVLA	4	4	3	-0.014	-0.062	-0.151
KAEF	3	3	3	-0.024	-0.023	0.010
KLBF	3	3	3	0.063	-0.040	-0.060
SQBB	3	3	3	-0.038	-0.024	-0.007
TSPC	3	3	3	0.016	-0.007	-0.066
ADES	3	3	3	-0.009	-0.183	-0.025
TCID	4	4	4	-0.091	-0.013	0.179

**LAMPIRAN 3 DATA PENELITIAN (LANJUTAN)**

EMITEN	GROWTH			DER		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
SMBR	0.065	0.040	0.203	0.031	0.022	0.019
TOTO	0.085	0.200	0.110	0.123	0.132	0.159
INAI	0.100	0.457	0.483	0.261	0.174	0.104
PICO	0.154	0.014	0.007	0.092	0.191	0.125
EKAD	0.087	0.258	0.009	0.022	0.026	0.047
SOBI	0.190	0.041	0.176	0.037	0.031	0.029
SRSN	0.021	0.205	0.124	0.039	0.038	0.053
AKPI	0.102	0.170	0.037	0.173	0.170	0.274
JPFA	0.201	0.142	0.023	0.356	0.351	0.332
ALDO	0.428	0.237	0.090	0.037	0.036	0.030
BRAM	0.149	0.038	0.001	0.075	0.173	0.179
PRAS	0.019	0.410	0.054	0.085	0.028	0.102
SMSM	0.046	0.110	0.065	0.101	0.038	0.094
TRIS	0.199	0.114	0.151	0.038	0.056	0.043
BATA	0.201	0.118	0.020	0.039	0.038	0.047
JECC	0.207	0.002	0.114	0.032	0.042	0.079
AISA	0.476	0.267	0.169	0.252	0.310	0.259
ICBP	0.163	0.196	0.057	0.155	0.146	0.157
INDF	0.153	0.102	0.007	0.259	0.256	0.257
ROTI	0.264	0.249	0.156	0.392	0.408	0.415
SKLT	0.412	0.202	0.093	0.121	0.111	0.175
STTP	0.320	0.281	0.172	0.120	0.202	0.186
ULTJ	0.231	0.132	0.122	0.058	0.055	0.051
GGRM	0.131	0.176	0.079	0.025	0.021	0.023
HMSP	0.126	0.076	0.104	0.041	0.045	0.038
WIIM	0.419	0.046	0.107	0.044	0.036	0.043
DVLA	0.013	0.002	0.183	0.050	0.306	0.077
KAEF	0.164	0.040	0.075	0.108	0.145	0.088
KLBF	0.173	0.085	0.030	0.015	0.018	0.029
SQBB	0.100	0.167	0.035	0.019	0.015	0.017
TSPC	0.034	0.096	0.089	0.037	0.040	0.040
ADES	0.054	0.152	0.157	0.156	0.107	0.192
TCID	0.095	0.138	0.003	0.504	0.528	0.069

#### LAMPIRAN 4 DATA OUTLIER

EMITEN	CETR			INST			PDK		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
CPIN	0.193	0.479	0.275	0.555	0.555	0.555	0.333	0.333	0.333
BRAM	0.671	0.325	0.283	0.658	0.658	0.658	0.429	0.400	0.400
SRIL	0.234	0.127	0.187	0.561	0.561	0.561	0.333	0.333	0.333

EMITEN	KOM_AUD			KONACC		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
CPIN	5	5	5	0.007	0.051	-0.027
BRAM	3	3	3	-0.081	-0.086	-0.095
SRIL	3	3	3	0.034	0.044	-0.036

EMITEN	GROWTH			DER		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
CPIN	0.204	0.136	0.033	0.219	0.261	0.260
BRAM	0.149	0.038	0.001	0.075	0.173	0.179
SRIL	0.243	0.096	0.067	0.186	0.577	0.561